

# KUMPULAN INTISARI PENELITIAN TAHUN 2017 - 2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN PINRANG**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNya, maka buku dengan judul "Kumpulan Intisari Penelitian" Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang dapat diselesaikan sesuai rencana.

Kumpulan Intisari Penelitian yang tersebar di 4 (empat) bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, buku ini menampilkan beberapa Executive Summary penelitian yang dipilih oleh tim untuk dimasukkan sebagai representasi dalam buku kumpulan Intisari Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pinrang.

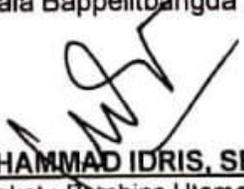
Melalui Kumpulan Intisari Penelitian Bappelitbangda Kab. Pinrang, Perangkat Daerah dan masyarakat dapat mengetahui sejauhmana hasil-hasil penelitian serta implementasinya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Hasil penelitian dapat diambil dua manfaat. Pertama Perangkat daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi daerah sehingga potensi daerah menjadi optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pemerintah daerah dapat mengundang ahli-ahli untuk mensuervisi atau membimbing aparatur daerah sehingga produktivitas dan layanan kepada masyarakat lebih optimal.

Semoga Kumpulan Intisari Penelitian Bappelitbangda Kab. Pinrang ini bermanfaat luas bagi Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Mudah-mudahan segala jerih payah yang dilakukan oleh Bidang-Bidang di Bappelitbangda Kab. Pinrang dan para Ahli mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Pinrang, Oktober 2022

Kepala Bappelitbangda Kab. Pinrang

  
**MUHAMMAD IDRIS, SE., M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621231 19903 1 107



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>TAHUN 2017</b>	
1. Analisis Sesuaian Lahan dan Daya Dukung Lahan di Kab. Pinrang .....	1
2. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Pinrang .....	4
3. Pemetaan Klaster Komoditi Perikanan Budidaya Kab. Pinrang .....	8
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kab. Pinrang .....	11
<b>TAHUN 2018</b>	
1. Input Output Penggunaan Dana Desa Kab. Pinrang .....	16
2. Pengembangan Manajemen Area Terpadu Berorientasi Pasar Eropa dan Amerika pada Kawasan Budidaya Udang Windu sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang .....	18
3. Pemetaan Potensi Kawasan Penghijauan .....	20
4. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	22
5. Roadmap Pembangunan Peningkatan Kedudukan dan Kualitas Peran Perempuan Berbasis Kelembagaan Kab. Pinrang .....	25
6. Masterplan Jalan Perkotaan .....	27
7. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) .....	28
8. Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	29
<b>TAHUN 2019</b>	
1. Kajian Revitalisasi Kawasan Wisata WaetuoE Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang .....	30
2. Pemetaan Ekonomi Komoditas Perkebunan Utama .....	33
3. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pangan dan Gizi .....	35
4. Rencana Aksi UMKM dan Koperasi .....	37
5. Grand Desain Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Pinrang .....	40
6. Grand Desain dan Database Sarana dan Prasarana Olahraga .....	43
7. Grand Desain Sistem Kearsipan Kabupaten Pinrang .....	45
<b>TAHUN 2020</b>	
1. Pemetaan Pengembangan Kawasan Peternakan .....	47
2. Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) .....	50
3. Survey Kebijakan Publik Kabupaten Pinrang .....	53
4. Masterplan RSUD Madising Kab. Pinrang .....	55
5. Feasibility Study Penentuan Jenis Perkerasan Jalan Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa .....	58
6. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan Luwita Tahun 2020-2024 .....	59
<b>TAHUN 2021</b>	
1. Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2035 .....	60
2. Rencana Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pinrang .....	62
3. Grand Desain Perpustakaan Kab. Pinrang .....	66
4. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kab. Pinrang .....	67

5. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Berbasis Budidaya kakap Putih .....	69
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kab. Pinrang .....	73
7. Feasibility Study Penentuan Jenis Perkerasan Jalan Kecamatan Duampanua Dan Kecamatan Patampanua .....	76
8. Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kab. Pinrang .....	77
9. Review Penyusunan Dokumen Rispam Kab. Pinrang .....	78

## ANALISIS SESUAIAN LAHAN DAN DAYA DUKUNG LAHAN TAMBAK DI KABUPATEN PINRANG

CV. Meuthia Multi Konsultan, Tahun 2017

### LATAR BELAKANG

Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara darat dan laut (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34, Tahun 2002). Wilayah ini sangat kompleks karena dipengaruhi berbagai kegiatan yang ada di luar maupun di dalam wilayah pesisir itu sendiri. Pengelolaan pesisir meliputi kegiatan penangkapan maupun pengelolaan budidaya tambak yang komoditas utama bandeng (*Chanos-chanos*), udang windu (*Penaeus monodon*), dan udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*).

Sekitar 70% dari masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kegiatan sebagai petani dan nelayan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan; Riset Dikti (2016) tambak udang di Sulawesi Selatan meliputi areal seluas 85.000 ha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 156.000 jiwa. Secara nasional, tenaga kerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha budidaya dan pengelolaan udang berjumlah sekitar 15 juta jiwa. Tambak udang Sulawesi Selatan sekitar 92,7% masih dikelola dengan teknologi sederhana (tradisional), 6,2% dengan teknologi madya/semi intensif, dan 1,1% dengan teknologi maju/intensif.

Luas wilayah pesisir Kabupaten Pinrang mencapai 1.457 km<sup>2</sup> atau 74,27% dan panjang garis pantai kurang dari sepanjang 93 km sehingga terdapat areal pertambakan seluas 15.026, 20 Ha atau 22,72%, sehingga terpilih sebagai Kawasan Minapolitan dan Industrialisasi Perikanan dengan komoditas seperti udang, bandeng dan rumput laut.

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian lahan dan daya dukung lahan tambak dalam pengembangan kawasan minapolitan udang secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

- Mengevaluasi kondisi eksisting kawasan budidaya tambak pada sentra budidaya minapolitan, Kabupaten Pinrang.
- Mengkaji kesesuaian lahan tambak berdasarkan tingkat teknologi budidaya pada kawasan minapolitan Kabupaten Pinrang.
- Mengetahui kapasitas asimilasi daya dukung lingkungan perairan untuk mendukung pengembangan budidaya tambak di kawasan Minapolitan Kabupaten Pinrang.

### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah konseptual. Kegiatan analisis kesesuaian lahan tambak dan daya dukung lingkungan di Kawasan Minapolitan udang Kabupaten Pinrang adalah:

- Kegiatan persiapan (Rapat Koordinasi dan Rapat Tim Teknis);
- Kegiatan pengumpulan data sekunder;
- Kegiatan survey lapangan;
  - Pemanfaatan Wilayah Darat dan Laut Eksisting;
  - Biogeofisik, Sarana dan Prasarana kawasan Minapolitan;
  - Demografi, sosial dan budaya;
- Perikanan budidaya;

Data yang dikumpulkan dari kegiatan ini, meliputi :

- o Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya : seluas lahan budidaya yang potensial, luas lahan budidaya yang sudah dimanfaatkan, potensi produksi, produksi saat ini.
  - o Kondisi sarana prasarana dasar budidaya tambak (jenis, ukuran, jumlah).
  - o Nelayan dan pembudidaya (jumlah rumah tangga perikanan).
- e. Analisis data
- o Pemanfaatan kawasan pesisir dan laut eksisting;
  - o Analisis kesesuaian lahan;
  - o Analisis kuantifikasi air;
  - o Analisis daya dukung wilayah;
  - o Sarana dan prasarana kawasan minapolitan kabupaten pinrang;
  - o Demografis atau sosial dan budaya;
  - o Ekonomi wilayah;

## KESIMPULAN

1. Kondisi eksisting kawasan budidaya tambak pada sentra kawasan minapolitan, di Kecamatan Suppa telah ditetapkan sebagai daerah yang menjadi kawasan minapolitan dengan sentra pengembangan tambak di Desa Tasiwalie dengan luas tambak mencapai 309,19 Ha, dan didukung oleh desa-desa lainnya (sub-sentra) seperti Desa Wiringtasi dengan luas tambak 327,26 ha dan Desa Lotang Salo dengan luas tambak 230,69 ha.
2. Desa Lotang Salo untuk tambak tradisional luasnya 28,66 ha dan semi intensif 204,86 ha. Desa Maritengngae untuk tambak tradisional 5,31 ha dan semi intensif 70,58 ha, dan intensif 101,35 ha. Desa Tasiwalie untuk tradisional 28,77 ha, semi intensif 205,91 ha dan intensif 51,93 ha. Untuk Desa Watang Suppa untuk kesesuaian tambak tradisional 46,71 ha, semi intensif 9,69 ha dan intensif 36,35 ha. Sedangkan di Desa Wiringtasi untuk kesesuaian tambak tradisional 37,46 ha, semi intensif 133,03 ha dan intensif 228,72 ha.
3. Mengetahui kapasitas asimilasi dan daya dukung lingkungan perairan seluruh lahan tambak di Desa Tasiwalie yang eksisting dikembangkan budidaya teknologi intensif dengan estimasi produksi maksimum 1,28 ton ha<sup>-1</sup>, maka luas lahan yang diperoleh agar tidak melampaui daya dukung adalah seluas 517,41 ha. Untuk Desa Wiringtasi dikembangkan budidaya teknologi intensif dengan produksi maksimum 1,22 ton ha<sup>-1</sup> maka luas lahan tambak yang diperbolehkan adalah seluas 154,82 ha.  
Lahan tambak di Desa Tasiwalie dikembangkan untuk budidaya semi intensif dengan produksi maksimum 862,97 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup>, maka luas lahan tambak yang diperbolehkan agar tidak melampaui daya dukung seluas 1.045 ha. Untuk Desa Wiringtasi jika seluruh lahan dikembangkan untuk budidaya semi-intensif dengan estimasi produksi sebesar 812,97 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> maka luas lahan tambak yang diperbolehkan seluas 314,64 ha, dan untuk Desa Lotang Salo dengan produksi maksimum 763,31 ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> luas lahan tambak yang direkomendasikan seluas 94,64 ha. Lahan tambak dikembangkan untuk budidaya tradisional di Desa Tasiwalie, Desa Wiringtasi dan Desa Lotang Salo dengan produksi maksimum 250kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> maka luas lahan tambak yang diperbolehkan agar tidak melampaui daya dukung berturut turut seluas 1.966,18 ha, 557, 37 ha, 157,73 ha.
4. Jika seluruh lahan tambak dikembangkan untuk budidaya tradisional di Desa Maritengngae dan Kelurahan Watang Suppa dengan produksi maksimum 91,54 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> dan 10,57 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> maka luas lahan tambak yang diperbolehkan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan berturut-turut seluas 66,18 ha dan 32 ha. Untuk budidaya semi intensif di Desa Maritengngae dan Kelurahan Watang Suppa dengan produksi maksimum 11,8 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> dan 17,21 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> maka luas lahan tambak yang diperbolehkan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan berturut turut seluas 45 ha dan 39,24. Sedangkan untuk budidaya intensif di Desa

Maritengngae dan Kelurahan Watang Suppa dengan produksi maksimum 62,28 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> dan 21,65 kg ha<sup>-1</sup> MT<sup>-1</sup> maka luas lahan tambak yang diperbolehkan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan berturut-turut seluas 17,41 ha dan 23,71 ha.

5. Untuk keberlanjutan pengelolaan perikanan budidaya tambak direkomendasikan hanya skala usaha perikanan budidaya semi intensif, dengan padat penebaran, sumber air yang berasal dari teluk pare-pare direkomendasikan 60.000/ha dan yang berasal dari Selat Makassar padat penebarannya maksimal 80.000. sementara itu skala usaha tradisional pada penebaran hanya 4 ekor sumber air Teluk Parepare dan 6 ekor sumber airnya dari bagian barat Selat Makassar.

#### SARAN

1. Untuk mendukung pengembangan tambak di kawasan minapolitan Kec. Suppa, maka seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan harus dibangun untuk menunjang kebutuhan kawasan.
2. Seluruh stakeholder yang terkait dapat memberi dukungan yang kuat sehingga perkembangan kawasan minapolitan tambak dapat berkembang dengan cepat.
3. Seluruh kegiatan budidaya intensif, dapat memperhatikan proses pengolahan limbah air dari kegiatan budidaya sebelum dibuang ke laut. BLHD harus tetap memantau instalasi pengolahan limbah (IPAL) dari setiap usaha budidaya intensif termasuk air limbah yang dibuang ke laut.

## ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN PINRANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pinrang berkerjasama Badan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2017

### PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah yaitu pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam pencapaian kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan inovasi. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian perekayasaan dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.

SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Sedangkan Roadmap adalah salah satu alat perencanaan berorientasi masa depan atau foresight yang merupakan perencanaan dinamis yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan. Roadmap juga merupakan alat efektif sebagai suatu mekanisme untuk mengintegrasikan beragam elemen organisasi (tatanan kelembagaan tertentu) secara kolaboratif, dalam merencanakan penguatan sistem inovasi secara sistematis.

Substansi Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pinrang dikembangkan dari visi dan misi pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi tahun 2019-2024 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah" dan misi ketujuh yaitu : Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan".

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pinrang akan mencerminkan 6 (enam) agenda kebijakan inovasi dalam bentuk indikator-indikator yang berkesesuaian. Pilar prakarsa implementasinya terdiri atas Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Penguatan Klaster Industri/Inovasi, Penguatan Jaringan Inovasi, Penguatan Teknopreneur dan Pengembangan Tematik Daerah akan mengerucut kedalam serangkaian kegiatan pendampingan teknis, pengkajian kebijakan (action research) dan intermediasi.

### KONDISI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Gambaran umum kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) terdiri atas 5 pilar prakarsa dan dari setiap pilar masing-masing dibagi menjadi 6 elemen kerangka kebijakan inovasi:

1. Pilar 1: Penguatan sistem inovasi daerah;
2. Pilar 2: Penguatan karakter industri;
3. Pilar 3: Penguatan jaringan inovasi;
4. Pilar 4: Penguatan teknopreneur;
5. Pilar 5: Pengembangan tematik Daerah.

Adapun Elemen Kerangka Kebijakan Inovasi:

1. Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis;
2. Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
3. Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi;
4. Elemen 4 : Budaya inovasi;
5. Elemen 5 : Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah;
6. Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global.

Dari 5 (lima) pilar prakarsa penguatan SIDA dan 6 (enam) elemen kerangka kebijakan inovasi maka dapat digambarkan bahwa kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ruang publik sebagai sarana untuk berinteraksi masyarakat yang diarahkan sebagai RPK untuk memunculkan komunitas masih kurang;
2. Kelembagaan dan daya dukung iptekin, litbang, perekayasaan, kemampuan absorpsi industri belum ada sinergisitas dan interaksi secara optimal
3. Kaidah-kaidah penguatan SIDA belum tersosialisasi di seluruh aktor di daerah;
4. Partisipasi masyarakat dalam berinovasi masih belum memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah;
5. Kerjasama antar daerah dan pusat di bidang penguatan inovasi belum berjalan dengan optimal;
6. Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih lemah dan produk masih sedikit.

#### TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA

Tantangan dan peluang dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
  - a. Kemiskinan;
  - b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. Otonomi Daerah;
  - d. Ketenagakerjaan;
  - e. Perdagangan;
  - f. Perindustrian;
  - g. Reformasi Birokrasi;
  - h. Penguatan Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah.
2. Peluang Penguatan SIDA
  - a. Berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada globalisasi.
  - b. Penerapan Green Ekonomi.
  - c. Perdagangan Bebas.
  - d. Meningkatnya proses demokrasi dan penguatan tuntutan hak-hak asasi manusia.
  - e. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengatasi hambatan jarak dan waktu.
  - f. Regulasi pengembangan inovasi daerah.

#### KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN

Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pinrang yang diharapkan secara umum menggambarkan bagaimana capaian atau kondisi dari setiap elemen kerangka kebijakan inovasi (KIK), diantaranya sebagai berikut :

1. Ruang Publik Kreatif (RPK) sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas warga, interaksi antar masyarakat dan memenuhi ruang terbuka hijau terbangun.
2. Kelembagaan dan daya dukung iptekin, litbang, perekayasaan, kemampuan absorpsi industri (UMKM) bersinergi dan berinteraksi secara optimal.
3. Kaidah-kaidah penguatan SIDA telah tersosialisasi di seluruh aktor di daerah.

4. Partisipasi masyarakat dalam berinovasi masih berkontribusi bagi pembangunan daerah.
5. Kerjasama antar daerah dan pusat di bidang penguatan inovasi berjalan dengan optimal bagi pembangunan daerah.
6. Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meningkat dan kualitas kelembagaan maupun produk-produk terstandarisasi dengan baik.

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pinrang, diperlukan adanya strategi dan arah kebijakan yang tepat. Strategi yang digunakan untuk penguatan sistem inovasi daerah dikembangkan dari pilar-pilar strategis penguatan sistem inovasi sesuai dengan konteks sasaran, sedangkan arah kebijakan yang bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, menggunakan enam elemen kerangka kebijakan inovasi sesuai dengan konteks sasaran yang akan dicapai

Secara umum, strategi dan arah kebijakan penguatan Sistem Inovasi Kabupaten Pinrang yaitu:

##### 1. Strategi Penguatan Sistem Inovasi

Strategi Penguatan Sistem Inovasi yang dimaksud adalah prakarsa strategis yang perlu dilakukan dalam rangka upaya penguatan sistem inovasi di Pinrang, melalui 5 (lima) pilar:

- a. Pilar 1: Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah;
- b. Pilar 2: Pengembangan Klaster Industri/Inovasi;
- c. Pilar 3: Pengembangan Jaringan Inovasi;
- d. Pilar 4: Pengembangan Teknopreneur;
- e. Pilar 5: Pengembangan Kebijakan Audit Teknologi dan Tematik;

##### 2. Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi

Dalam upaya penguatan sistem inovasi di Pinrang, arah kebijakan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang merupakan pijakan bersama para pihak dalam pengembangan sinergitas dan koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya dirumuskan dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KIK) sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
- b. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/Litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UMKM.
- c. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.
- d. Mendorong budaya inovasi.
- e. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.
- f. Penyelarasan dengan perkembangan global.

#### PROGRAM DAN RENCANA AKSI PENGUATAN SIDa KAB. PINRANG

##### 1. Sasaran Meningkatkan Ekosistem Inovasi

- Strategi : Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah.
- Program : Revisi RPJPD dan penyusunan RPJMD, Penyediaan basis data inovasi daerah, pengembangan desa mandiri dan inovatif.

##### 2. Mengembangkan klaster industri

- Strategi: Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah.

- Program : Penataan industri (penyusunan kebijakan kluster industri/inovasi), pengembangan pemanfaatan IPTEKIN, difusi teknologi dan inovasi produksi.
- 3. Mengembangkan jaringan inovasi.
  - Strategi : Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi.
  - Program : Persiapan dan pembangunan infrastruktur technopark dan desa inovasi, peningkatan jaringan inovasi daerah.
- 4. Mengembangkan Teknopreneur
  - Strategi : Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya.
  - Program : Pengembangan pusat inovasi, pengembangan produk kluster industri berstandar SNI dan ASEAN.
- 5. Mengembangkan tematik daerah
  - Strategi : Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi atau inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah.
  - Program : Pengembangan budaya inovasi bersih dan hijau di masyarakat dan pemerintah daerah, pengembangan keterpaduan kebijakan sistem inovasi dalam menangani masalah pemenuhan kebutuhan dasar.

## PEMETAAN KLAS TER KOMODITI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN PINRANG

CV. Armedia Consultant, TAHUN 2017

### PENDAHULUAN

Kabupaten Pinrang secara geografis memiliki potensi agraris dan bahari yang cukup besar untuk mendorong aktivitas perekonomian dalam daerah. Khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, potensi utama terletak di 6 (enam) wilayah kecamatan dengan memiliki wilayah pesisir untuk perikanan tambak dan tangkap, dan hamper di semua wilayah kecamatan untuk perikanan darat. Tata laksana pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan difokuskan pada percepatan peningkatan produksi kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat dan ekonomi pembangunan daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah:

1. Melakukan evaluasi makro tutupan lahan perikanan budidaya darat, payau/pesisir di Kabupaten Pinrang;
2. Melakukan observasi konfirmasi hasil pencitraan dengan beberapa titik terduga (ground check points);
3. Mengidentifikasi sebaran produksi perikanan budidaya dan menentukan titik-titik sentra, titik-titik hinter-land pada kawasan minapolitan di Kabupaten Pinrang;
4. Melakukan analisis karakteristik wilayah tertentu (kawasan tertentu) dengan komoditi perikanan yang saat sekarang sedang dikembangkan, komoditi yang paling ideal dikembangkan;
5. Melakukan klusterisasi kawasan, klusterisasi komoditi dan arahan pengembangan kawasan setelah dilakukan konfirmasi dengan pola ruang yang telah diatur oleh pemerintah; dan
6. Merumuskan model dan strategi pengembangan klaster.

### METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode purposive sampling, yaitu metode sampling yang didasarkan pada suatu pertimbangan baik yang didasarkan pada keputusan pakar berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sampling. Secara garis besar prosedur penelitian dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Evaluasi makro penggunaan lahan perikanan budidaya darat, payau dan laut dengan SIG;
2. Buffering Aliran Sungai dan Pantai;
3. Dinamika Arah dan Kecepatan Arus Permukaan Perairan;
4. Dasar Perairan;
5. Evaluasi Morfologi Pantai;
6. Analisis Kondisi/Kesesuaian Perikanan Budidaya/Tambak;
7. Pengecekan lapangan/konfirmasi hasil analisis citra dengan beberapa titik terduga (ground check points);
8. Analisis Penentuan dan Peringkat Kawasan (sebaran produksi perikanan budidaya dan menentukan titik-titik sentra, titik-titik hinter-land pada kawasan minapolitan di Kabupaten Pinrang);

### POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA

#### 1. Komoditi Perikanan Budidaya

Terdapat beberapa komoditi perikanan budidaya yang diusahakan di Kabupaten Pinrang, khususnya pada perairan payau (pesisir) terutama adalah ikan bandeng

dan beberapa jenis udang, sementara budidaya ikan air tawar terutama adalah jenis ikan nila dan ikan mas, terdapat juga potensi budidaya laut seperti ikan kerapu dan rumput laut.

2. Potensi Lahan

Areal tambak di Kabupaten Pinrang terkonsentrasi di sepanjang pesisir barat kabupaten, terutama pada desa kecamatan yang memiliki daerah pesisir. Khusus potensi lahan tambak diketahui terdapat 6 (enam) kecamatan produsen, sementara untuk produksi kolam dan sawah menyebar di semua wilayah kecamatan dalam ukuran-ukuran yang kecil.

### KONDISI PERIKANAN BUDIDAYA

Kondisi perikanan budidaya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perikanan Tambak

Pada perikanan tambak ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu manajemen produksi dan evaluasi kondisi tambak.

2. Perikanan Darat

Pada perikanan darat ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu manajemen produksi dan potensi lahan dan ekonomi perikanan budidaya darat.

3. Rumput Laut

Pada rumput laut ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu potensi lahan dan evaluasi kondisi lahan.

Tantangan pengembangan (isu strategis) pada kondisi perikanan budidaya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Isu lokal

Evaluasi kondisi fisik makro tambak di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa kondisi pertambakan secara umum masih berada pada keadaan optimum, terutama pada sentra-sentra kawasan pengembangan/minapolitan. Satu masalah yang ditemukan pada evaluasi fisik diatas adalah sisi kesegaraman nilai ukur tambak yang dominan baik pada tempat tertentu, namun disekitarnya masih terdapat kondisi tambak yang relatif rendah.

Secara sederhana isu-isu lokal strategis hasil temuan, dikelompokkan ke dalam aspek 1) aspek teknis on-farm; 2) aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan petani/petambak; 3) ekonomi dan pemasaran; dan 4) aspek lingkungan.

2. Isu regional dan nasional

Kabupaten Pinrang bukan memainkan peran kecil terhadap dinamika produksi perikanan budidaya dalam daerah, peran tersebut meliputi potensi lahan, produksi dan tenaga kerja (SDM) perikanan budidaya.

### PEMBANGUNAN KLAS TER PERIKANAN BUDIDAYA

1. Klaster Perikanan Budidaya

Klaster merupakan kelompok industri/usaha inti yang terkonsentrasi secara kewilayahan, regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif.

2. Pengembangan, Sebaran dan Kesesuaian

Komponen-komponen interaksi yang menyusun suatu klaster komoditi di Kabupaten Pinrang hamper tersedia semuanya. Klaster merupakan hubungan antar satu jenis kegiatan ekonomi mulai dari kegiatan produksi primer, pengepul, pengolah setengah jadi atau jadi, pedagang dan eksportir serta kegiatan dan pelayanan penunjang seperti lembaga keuangan, pelayanan usaha, pendidikan, penelitian dan lainnya.

## KESIMPULAN

- Hasil evaluasi makro tutupan lahan perikanan budidaya darat, payau/pesisir di Kabupaten Pinrang menunjukkan kondisi kawasan tambak sebagian besar ada dalam keadaan baik, namun tidak seragam pada satuan kawasan yang lebih luas.
- Isu strategi utama pada tingkat on-farm adalah masalah kualitas dan kuantitas air tambak; pada tingkat regional kabupaten Pinrang berperan bukan hanya pada sisi produksi dan jenis komoditinya, namun juga dari segi kuantitas rumah tangga dan dan tenaga kerja perikanan budidaya.
- Klaster kawasan dan komoditi yang dikembangkan di kabupaten Pinrang adalah : klaster bandeng, klaster udang (windu dan vaname), klaster perikanan darat dan klaster rumput laut.
- Penguatan basis data dan pengembangan sistem informasi produksi, pasar, sarana produksi dan penyakit perikanan budidaya (SO1)
- Sembilan strategi pokok pengembangan klaster perikanan budidaya kabupaten Pinrang adalah a) penguatan basis data dan pengembangan sistem informasi produksi, pasar, sarana produksi dan penyakit perikanan budidaya; b) fasilitasi dan penguatan saling dukung pemerintah , swasta dan petani/nelayan/petambak; c) penguatan produksi inti klaster berwawasan lingkungan (konservasi); d) pembenahan sistem pengairan secara terencana, bertahap dan menyeluruh; e) penguatan kemandirian pakan dan benih melalui KUKM perikanan dan budaya; f) pemeliharaan jaringan pengairan berbasis pemberdayaan masyarakat; g) penguatan sistem pengawasan mutu pakan dan benih; h) penguatan saling keterkaitan antar unit-unit klaster dalam sistem kawasan terintegrasi (WT2); dan i) peningkatan daya saing produk komoditi perikanan budidaya.

## REKOMENDASI

- Tindakan pembenahan regulasi pengairan di kawasan tambak kabupaten Pinrang perlu segera dilakukan, karena berimplikasi terhadap kondisi berkelanjutan usaha perikanan budidaya tambak;
- Pengembangan koperasi, usaha kecil dan mikro (KUKM) perlu dilakukan terutama untuk mendukung pengembangan produsen/pabrik pakan lokal;
- Pada sisi kebijakan daerah, diperlukan regulasi hukum yang efektif dalam menata mekanisme pemasaran pakan dan benih; pengawasan mutu pakan dan benih yang beredar; dan pengendalian lalu lintas transportasi saprodi dan pemasaran yang memperhatikan sistem biosekuritas kawasan;
- Kondisi keterlindungan wilayah pesisir cukup memperhatikan dengan menurunnya tutupan vegetasi dan banyaknya interaksi langsung antara tambak dan laut.

## LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KABUPATEN PINRANG

PT. Multicipta Adhirancana Konsultan, Tahun 2017

### PENDAHULUAN

Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Keberadaan lahan pertanian pangan sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang 2012-2032, yang secara tegas telah menetapkan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 44.861 ha. Dengan ditetapkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut, akan menjamin keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat dan sebagai upaya perlindungan terhadap lahan-lahan subur dengan produktivitas tinggi di Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini, lahan pertanian yang sudah ada dapat dipertahankan keberadaannya bahkan dapat ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian secara nasional maupun luas pengelolaan lahan perkapita.

Namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang, kondisi lahan pertanian kurun waktu lima tahun terakhir semakin tergerus oleh aktivitas ekonomi, terutama untuk kegiatan perkotaan seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan berbagai kegiatan perkotaan lainnya menyebabkan banyak lahan pertanian yang harus beralih fungsi menjadi non-pertanian.

### KETENTUAN UMUM

Dalam penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, digunakan berbagai istilah dan definisi, seperti :

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah.
- b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- c. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- e. Pusat Pelayanan Wilayah adalah PPW disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi pertanian tanaman pangan dengan skala pelayanan wilayah terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan tanaman pangan yang dilayaninya.

### TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Tujuan Penataan Ruang LP2B Kabupaten Pinrang adalah “mewujudkan ketahanan pangan yang berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Dari tujuan tersebut diharapkan :
  - a. Memicu pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang;
  - b. Mewujudkan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tani;
  - c. Memanfaatkan peluang dan mampu menempatkan kendala pengembangan sebagai bahan komponen modal pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang; dan

- d. Menciptakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang yang bersinergi dengan fungsi ruang yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Pinrang, dengan tetap memperhatikan dinamika masyarakatnya.
2. Kebijakan Penataan Ruang LP2B Kabupaten Pinrang
  - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan lahan pangan dalam kontribusi perekonomian Kabupaten Pinrang secara berkelanjutan;
  - b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu;
  - c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang saling terintegrasi untuk menunjang aktivitas kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
  - d. Pengendalian perkembangan kegiatan sesuai fungsi, daya dukung dan daya tampung di kawasan lahan pangan berkelanjutan.
3. Strategi Penataan LP2B Kabupaten Pinrang
  - a. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan lahan pangan dalam kontribusi perekonomian Kabupaten Pinrang secara berkelanjutan;
  - b. Strategi pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu;
  - c. Strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang saling terintegrasi untuk menunjang aktivitas kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang;
  - d. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan sesuai fungsi, daya dukung dan daya tampung di kawasan lahan pangan berkelanjutan.

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

Perencanaan tata ruang merupakan proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana struktur ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, merupakan kerangka tata ruang rinci yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana, terutama jaringan transportasi.

##### 1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang adalah kawasan yang memiliki potensi lahan pangan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dan Kabupaten Pinrang secara khusus. Dalam struktur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, salah satu pembentuk struktur ruang adalah sistem pusat-pusat kegiatan dan sistem permukiman. Hirarki sistem pusat-pusat kegiatan dan permukiman di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang diarahkan sebagai pusat permukiman dengan skala pelayanan kabupaten. Rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem pusat kegiatan inti dan sistem pusat permukiman

##### 2. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan.

Ketersediaan infrastruktur dalam mendukung atau menunjang proses pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang memiliki peranan yang sangat penting. Dengan adanya ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, proses perkembangan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang dapat berjalan dengan baik dan efisien. Transportasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pengembangan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang. Penilaian sistem transportasi ini akan menilai ketersediaan dan kesiapan pelayanan transportasi lokal Kabupaten Pinrang dalam menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Pinrang. Penilaian sistem transportasi ini ditujukan kepada pelayanan transportasi darat (jaringan jalan, terminal, sistem pengangkutan) untuk mendukung perkembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang.

3. Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan.

Prasarana kelistrikan dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas dan kegiatan seperti penerangan, kegiatan industri dan lain sebagainya. Energi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang saat ini dilayani oleh PLN. Untuk meningkatkan frekuensi kegiatan di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, perlu didukung oleh prasarana kelistrikan, oleh karena itu penyediaan jaringan listrik memegang peranan penting terutama dalam hal penerangan dan operasional kegiatan usaha peningkatan produksi lahan pangan.

Jaringan energi kelistrikan di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara. Kondisi saat ini hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Pinrang telah terlayani oleh sistem jaringan listrik, namun dalam hal ketersediaan daya listrik masih belum mencukupi, sebagaimana terjadi juga di daerah-daerah-daerah lain.

4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi.

Jaringan telekomunikasi akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan tingkat perekonomian penduduk dan teknologi informasi yang semakin maju, terutama telekomunikasi nirkabel (seluler), semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara telekomunikasi dan sarana pendukung media telekomunikasi.

Secara umum, kebutuhan pelayanan jaringan telepon di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, akan mengalami peningkatan, seiring dengan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, serta aktivitas masyarakat yang cukup dinamis. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, difokuskan pada pengembangan sistem koneksi antar wilayah/kawasan, sehingga yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan jaringan telepon kabel bawah tanah (serat optik), sistem komunikasi nirkabel (satelit) serta penataan infrastruktur sistem komunikasi seluler melalui pengembangan BTS bagi para provider (operator) telepon seluler.

5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan SDA.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karenanya penyediaan air dalam suatu kawasan sangat diperlukan untuk pelayanan seluruh penduduk dan fasilitas pendukungnya. Wilayah Kabupaten Pinrang cukup potensial akan sumber daya air, terutama potensi sumber air permukaan berupa sungai.

Rencana pengembangan sumber daya air di wilayah Kabupaten Pinrang lebih diprioritaskan pada penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum penduduk melalui sistem jaringan pelayanan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pinrang. Bagi daerah pedesaan yang memang cukup sulit dikembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui pelayanan PDAM, dikembangkan pola swadaya secara komunal dengan memanfaatkan sumber air minum berupa mata air dan air tanah yang memang selama ini telah banyak dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Pinrang terutama di daerah pedesaan.

Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Pinrang dilakukan sebagai upaya memacu peningkatan produktivitas lahan pertanian persawahan. Dengan mengembangkan sistem jaringan irigasi diharapkan pemenuhan swasembada beras dapat tercapai atau bahkan bisa mencapai surplus sehingga tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik secara berkelanjutan, mengingat wilayah di Kabupaten Pinrang masuk dalam pengembangan kawasan strategis Provinsi sebagai daerah lumbung beras provinsi, maka dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan persawahan menjadi lebih besar lagi, diperlukan adanya langkah-langkah dalam mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air.

6. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah.  
Rencana pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Pinrang dilakukan dengan sistem saluran terbuka. Hal ini dilakukan dengan pengembangan investasi pembiayaan infrastruktur tersebut, dimana dalam hal investasi saluran terbuka lebih ekonomis dibanding saluran tertutup, dan tetap efektif dalam fungsinya.
7. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
  - a. Pengurangan sampah maksimal semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
  - b. Peningkatan peran aktif masyarakat dan usaha swasta sebagai mitra engelolaan;
  - c. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.
8. Rencana Penanganan Kawasan Rawan Bencana.
  - a. Kawasan rawan banjir;
  - b. Kawasan rawan longsor;
  - c. Kawasan rawan gempa dan tsunami;
  - d. Sistem mitigasi bencana.

#### RENCANA POLA RUANG

1. Rencana Pola Ruang Kawasan Inti merupakan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan kawasan prioritas kawasan penyangga dan lahan cadangan yang berguna mendukung perkembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Rencana Pola Ruang Kawasan Penyangga adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan.
3. Lahan Cadangan LP2B Kabupaten Pinrang, merupakan lahan cadangan yang direncanakan untuk pengembangan LP2B di Kabupaten Pinrang.

#### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

1. Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang  
Perwujudan program pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan pemukiman dan prasarana, dengan dua pola, yaitu: 1) peningkatan prasarana untuk melayani tingkat kebutuhan saat ini, dan 2) peningkatan prasarana untuk mendukung pemerataan pembangunan antar kawasan inti dan kawasan penyangga, melalui peningkatan aksesibilitas antar zona.
2. Program Perwujudan Rencana Pola Ruang  
Perwujudan rencana pola ruang di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam kawasan lahan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang yang meliputi perwujudan rencana peruntukan ruang untuk kawasan inti dan kawasan penyangga.
3. Indikasi Program Pembangunan  
Proses pembangunan secara bertahap (tahapan pembangunan) dilakukan dengan mengimplementasikan proram-program utama lima tahunan yang didasarkan pada struktur ruang, pola pemanfaatan ruang dan program pelaksanaan pembangunan di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang.

#### KETENTUAN PENGENDALIAN

1. Konsep Umum Pengendalian  
Konsep arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang menggunakan asumsi yang sama dengan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

- a. Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan wilayah dan local;
- b. Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air;
- f. Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem kawasan lindung;
- g. Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem kawasan budidaya.

3. Ketentuan Perizinan

Untuk mendayagunakan mekanisme perizinan dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang, maka setiap kegiatan yang dimohonkan izin pemanfaatan ruangnya perlu konfirmasi kesesuaian dengan RTRW dan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang sehingga jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan dan fungsi yang ditetapkan RTRW dan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang.

4. Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Sanksi

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang bukan hanya milik pemerintah daerah melainkan milik seluruh masyarakat sehingga bagi pihak yang tidak mentaatinya akan terdapat sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata

6. Perumusan Ranperda

Penyusunan draft Ranperda Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang merupakan langkah berikutnya setelah materi teknis disiapkan, substansi draft Ranperda Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang secara umum berisi :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pinrang (menggambarkan kesesuaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kabupaten);
- c. Rencana Struktur Ruang Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang;
- d. Rencana Pola Ruang Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang;
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pinrang.

## INPUT OUTPUT PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PINRANG

Prof. Haedar Akib, M.Si., Tahun 2018

### PENDAHULUAN

Upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, maka pemerintah melakukan program pembangunan dengan mengeluarkan Dana Alokasi Desa dan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Program Dana Desa yang telah berjalan telah menuai banyak harapan seperti : 1) peningkatan daya beli masyarakat yang terjaga, 2) pembangunan infrastruktur, 3) peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 4) program padat karya, dan 5) mewujudkan lapangan kerja yang banyak.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah yang mengalami perlambatan dalam penyaluran dana desa melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut disebabkan karena belum menyelesaikan persyaratan yang telah disepakati, dan juga adanya desa yang tidak transparansi dalam pengelolaan pemerintahan seperti: perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran keuangan dan kebijakan lainnya.

### GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.961,77 km persegi, memiliki daerah administratif 12 kecamatan, yang terdiri dari 39 kelurahan dan 69 desa yang meliputi 81 lingkungan dan 168 dusun.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dimensi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa merupakan pengelolaan dana yang diperoleh dari APBN maupun APBD maupun sumber lain yang dikelola sesuai asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif sesuai dengan anggaran yang tersedia.

#### 2. Dimensi Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Wujud dalam penyaluran dana desa salah satunya adalah pembangunan sarana prasarana desa. Dimensi ini telah berperan sebagai penunjang dalam membantu jalannya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### 3. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat vital dalam pembangunan suatu desa. Hal ini disebabkan karena dengan masyarakat yang berdaya guna maka suatu daerah akan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan baik pada level daerah, nasional maupun internasional.

#### 4. Dimensi Penyelewengan

Dimensi penyelewengan merupakan hal yang menjadi sorotan publik terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Penyelewengan terjadi akibat perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### KESIMPULAN

a. Pemetaan Pengelolaan Dana Desa dilihat dari 4 (empat) kuadran yaitu:

- Kuadran A. Harapan masyarakat untuk ditingkatkan, akan tetapi masih rendah, seperti: 1) Dana Desa untuk mendanai pembangunan Sarpras Pengembangan Sistem Informasi Desa, 2) pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan;
- Kuadran B. Harapan masyarakat telah terealisasi 1) Proporsi Dana Desa untuk pembangunan desa (seperti sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur), 2)

- Dana Desa untuk mendanai pembangunan Sarpras Transportasi, 3) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan magang bagi pengurus BUMDesa;
- Kuadran C. Realisasi yang masih kurang, seperti: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) jumlah proporsi bagi kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam berwirausaha, peningkatan pendapatan, atau perluasan skala ekonomi masyarakat desa, kaum miskin, aset budaya;
  - Kuadran D. Pemerintah telah berupaya dengan baik sesuai anggaran, seperti: proporsi dana pemberdayaan masyarakat.
- b. Berdasarkan hasil pemetaan (IPA) dan evaluasi (Pendekatan CIPPO) pelaksanaan program dana desa terlihat adanya unsur yang belum/kurang (warna kuning) yaitu kesiapan dalam menjalankan program dan perencanaan yang belum terintegrasi, sehingga mempengaruhi output dan outcome-nya

#### SARAN

- a. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu bersinergi dalam mengoptimalkan sosialisasi aturan dan praktiknya dalam penggunaan dana desa;
- b. Pemerintah desa harus memikirkan program pembangunan lain selain sarana prasarana yang lebih potensial untuk meningkatkan “daya saing” desa;
- c. Perlu penguatan manajemen/tata kelola program pembangunan desa yang dibiayai melalui Dana Desa secara terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, tersimplifikasi (KISS), berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melahirkan e-planning pada tingkat desa perlu revitalisasi fungsi kelembagaan (pendampingan) pengelolaan dana desa.

## PENGEMBANGAN MANAJEMEN AREA TERPADU BERORIENTASI PASAR EROPA DAN AMERIKA PADA KAWASAN BUDIDAYA UDANG WINDU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PINRANG

Muhammad Hattah Fattah, Sitti Rahbiah, Taufik Sabir dan Abdul Salam Atjo,  
Tahun 2018

### PENDAHULUAN

Sejak tahun 1960-an budidaya udang windu (*penaeus monodon*) telah dikembangkan Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang telah menjadi sentra pengembangan budidaya udang windu di Indonesia. Pembangunan pembenihan (hatchery) udang windu yang pertama kali oleh pihak swasta di Indonesia, pertama kali dilakukan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Pengembangan budidaya udang windu yang tidak sejalan dengan kaidah daya dukung ekosistem telah menyebabkan industri budidaya udang nasional termasuk Kabupaten Pinrang mengalami stagnasi selama periode 1998-2007 yang diakibatkan oleh infeksi patogen terutama jenis white spot syndrome virus (WSSV) dan *Vibrio Harvey*.

Selama ini produk budidaya udang windu Kabupaten Pinrang di ekspor ke Jepang, diantaranya melalui PT. Alter Tred Indonesia (Atina) yang merupakan anak perusahaan dari Alter Tred Jepang INC (ATJ) yang berkedudukan di Tokyo, Jepang. Sebanyak 45% dari volume ekspor PT. Atina ke Jepang berasal dari Kabupaten Pinrang. Udang windu asal Kabupaten Pinrang banyak diminati oleh pasar internasional khususnya pasar jepang karena tergolong jenis udang kualitas premium. Udang windu asal Kabupaten Pinrang umumnya dipasok dari Kecamatan Suppa, Lanrisang, Mattiro Sompe dan Duampanua.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Atribut Proritas Kawasan Pinrang Shrimp Eco-Farming Park

Atribut prioritas adalah atribut utama yang berpengaruh penting terhadap kinerja Kawasan Pinrang Shrimp Eco-Farming Park dan keterpenuhan Standar SEASAIP, yang meliputi (1) sosial, (2) kebijakan, (3) teknologi, (4) dukungan stakeholders, (5) harga dan pasar, (6) kelembagaan, (7) hukum, (8) pencemaran, (9) pasokan air, (10) iklim, dan (11) patogen yang berpengaruh penting pada kinerja kawasan.

#### 2. Pengembangan Pengendalian Kerentanan

Mengacu pada protokol yang disusun SEASAIP ditetapkan 9 (Sembilan) atribut yakni (1) standar hatchery, (2) sumber benur, (3) ketertelusuran, (4) manajemen kesehatan udang, (5) penggunaan bahan pakan, (6) dampak lingkungan, (7) manajemen resiko, (8) sosial ekonomi, dan (9) isu komunitas.

#### 3. Tata Kelola Manajemen Area Terpadu

Kawasan Pinrang Shrimp Eco-farming Park telah ditetapkan menjadi percontohan nasional dalam penerapan Akuakultur dengan Pendekatan Ekosistem. Dalam merealisasi pencapaian tersebut dilakukan tindakan sebagai berikut: (1) Mengembangkan kawasan budidaya udang windu berbasis ekosistem; (2) Mengadaptasi teknologi budidaya udang windu mutakhir dan produktif serta berkelanjutan; (3) Mengembangkan teknologi aplikasi pakan alami *phronima suppa* (*Phronima* sp) menjadi inovasi nasional; (4) Mengembangkan kemandirian dalam memenuhi ketersediaan sarana produksi berkualitas, ekonomis dan ramah lingkungan; (5) Meningkatkan produksi udang windu kualitas premium selaras permintaan pasar internasional; (6) Membangun ahlak, etos kerja dan harmonisasi sosial antar pemangku kepentingan; dan (7) Mengakselerasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha.

Tata Kelola Kawasan Pinrang Shrimp Eco-farming Park menerapkan manajemen area terpadu dengan pendekatan AMA yang didasarkan pada kesatuan sistem pengelolaan berdasarkan kesamaan sistem hidro-oseanografi.

#### KESIMPULAN

- a. Atribut prioritas kawasan meliputi: (a) sosial, (b) kebijakan, (c) teknologi, (d) dukungan stakeholders, (e) harga dan pasar, (f) kelembagaan, (g) hukum, (h) pencemaran, (i) pasokan air, (j) iklim, dan (k) patogen yang berpengaruh penting pada kinerja kawasan;
- b. Kabupaten Pinrang selama tujuh tahun terakhir mengalami anomali iklim berupa El Niño dan La-Niña;
- c. Produk udang windu Kabupaten Pinrang berpotensi dipasarkan ke Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan cara memenuhi protokol SEASAIP yang terdiri dari 9 (sembilan) atribut yakni (a) standar hatchery, (b) sumber benur, (c) ketertelusuran, (d) manajemen kesehatan udang, (e) penggunaan bahan pakan, (f) dampak lingkungan, (g) manajemen resiko, (h) sosial ekonomi, dan (i) isu komunitas.
- d. Aquaculture Manajemen Area (AMA) pada Kawasan Pinrang Shrimp Eco-farming Park terdiri dari (a) DAS Sumpang Saddang yang terletak di Kelurahan Lanrisang serta (b) DAS Kampung Baru dan (c) DAS Salopokko yang terletak di Desa Waetuwo didesain untuk dapat menjadi praktek terbaik dalam penerapan Akuakultur dengan Pendekatan Ekosistem (ADPE) di tingkat Asia.
- e. Komoditas udang windu Kabupaten Pinrang yang diproduksi dengan pendekatan eco-shrimp dan menggunakan pakan alami unggul, *Phronima suppa* menghasilkan udang kualitas premium dengan keunggulan: (a) memiliki viabilitas tinggi, (b) rasa lebih gurih dan manis, (c) warna lebih hijau dan tidak pudar setelah disimpan pada cold storage, serta (d) memiliki kandungan residu bahan kimia yang dipersyaratkan pasar internasional yang tertinggi di Indonesia.

#### RANCANGAN KEBIJAKAN

Rancangan kebijakan penetapan Kawasan Shrimp-Eco-farming Park di Kecamatan Lanrisang secara formal sebagai kawasan khusus budidaya udang windu untuk menghasilkan udang jenis premium atau jenis eco-shrimp yang diperuntukkan untuk memenuhi pasar Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

#### IMPLIKASI KEBIJAKAN

- a. Konsistensi pengembangan udang windu kualitas premium di Kabupaten Pinrang sebagai penyanggah utama produksi udang windu Sulawesi Selatan dan nasional dengan melakukan inovasi budidaya udang windu secara berkelanjutan serta melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap kualitas pembinaan para pelaku usaha dan perbaikan infrastruktur khususnya normalisasi muara sungai dan saluran tambak serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran benur berkualitas dan pengendalian peredaran input produksi, pembuangan limbah budidaya udang windu ramah lingkungan.
- b. Mencanangkan Kawasan Salama di dalam dokumen perencanaan Kabupaten Pinrang termasuk mengakomodasinya di dalam Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD) Kabupaten Pinrang.

## PEMETAAN POTENSI KAWASAN PENGHIJAUAN

CV.Armedia Konsultan, Tahun 2018

### ANCAMAN KERUSAKAN ALAM

Fenomena kerusakan alam saat ini dengan mudah dapat dipantau baik melalui media cetak, elektronik maupun dapat dilihat secara langsung di lapangan. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap alam adalah seperti penebangan liar, alih fungsi lahan penghijauan menjadi pemukiman, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Sedangkan kerusakan alam yang terjadi di daerah pesisir juga bisa diakibatkan oleh masyarakat yang berada di wilayah pesisir maupun sekitarnya. Contoh kerusakan yang diakibatkan adalah seperti membuang limbah domestik.

Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan lingkungan yang parah, diduga sumberdaya milik bersama ini akan kehilangan nilai guna seperti yang diuraikan sebelumnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat mengakibatkan habitat alami menjadi rusak.

Kajian ini bermaksud untuk mengidentifikasi potensi kawasan penghijauan di kabupaten Pinrang menurut pendekatan geospasial yang setelah melalui beberapa tahapan konfirmasi lapangan dapat ditentukan kawasan - kawasan penghijauan untuk dirumuskan kedalam suatu bentuk peta tematik.

Adapun tujuan pemetaan potensi kawasan penghijauan, yaitu :

Tujuan Umumnya adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan konservasi alam sesuai dengan tujuan kelestarian ekosistem serta penghijauan.

Tujuan Khususnya adalah agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui seberapa penting kelestarian alam bagi kehidupan ekosistem sumberdaya alam dan masyarakat disekitarnya.

1. Melakukan observasi konfirmasi hasil pencitraan dengan beberapa titik terduga (ground check points);
2. Mengidentifikasi kawasan – kawasan penghijauan dan menentukan titik-titik sentra, titik-titik hinter-land di Kabupaten Pinrang;
3. Melakukan analisis karakteristik wilayah tertentu (kawasan tertentu) saat sekarang sedang dikembangkan, komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan, dan komoditi yang paling ideal dikembangkan;
4. Melakukan metode pengelompokan data kawasan – kawasan penghijauan, dan arahan pengembangan kawasan setelah dilakukan konfirmasi dengan pola ruang yang telah diatur oleh pemerintah;

Sasaran dari kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Penghijauan di Kabupaten Pinrang ini adalah :

1. Teridentifikasinya potensi lahan penghijauan di Kabupaten Pinrang;
2. Pemetaan dan identifikasi sebaran serta luas lahan potensi kawasan penghijauan secara detail;
3. Di wilayah Kelurahan/Desa serta Kecamatan di Kabupaten Pinrang.
4. Tersedianya peta potensi kawasan penghijauan beserta kondisi pendukungnya
  - a. Laporan yang berisikan rekomendasi Kawasan penghijauan di Kabupaten Pinrang yang disertai dengan jenis tanaman hutan yang sesuai untuk dikembangkan;
  - b. Analisis kesesuaian potensi Kawasan penghijauan di Kabupaten Pinrang berbasis Sistem Informasi Geografis;
  - c. Peta kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman hutan pada lokasi penghijauan;
  - d. Peta potensi Kawasan penghijauan di Kabupaten Pinrang.

Hasil pemetaan yang dilakukan diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman ilmiah dalam perencanaan pembangunan pengembangan wilayah kawasan penghijauan Kabupaten Pinrang secara lebih terarah dan terkoordinasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), harmonisasi kehidupan dan revitalisasi kawasan. Serta memberi kemudahan bagi pemerintah setempat dalam melakukan pengukuran/estimasi kawasan-kawasan penghijauan sehingga dapat membantu dalam regulasi kebijakan daerah.

Sebaran Wilayah Daratan	Kab. Pinrang	1.961,77	Ha, terdiri atas:
• Areal Hutan	: 93.360	ha	(47,59%)
• Areal Sawah	: 48.090	ha	(24,51%)
• Areal Perkebunan	: 13.340	ha	(6,8%)
• Areal Tambak	: 11.613	ha	(5,92%)
• Areal Rawa	: 1.205	ha	(0,61%)
• Areal Kolam	: 160	ha	(0,08%)
• Areal Padang Rumput	: 6.905	ha	(3,52%)
• Areal Pemukiman	: 11.167	ha	(5,69%)
• Lain-lain	: 10.337	ha	(5,27%)

### REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis potensi Kawasan penghijauan di Kabupaten Pinrang maka dapat direkomendasikan :

1. Program penghijauan di Kabupaten Pinrang mutlak untuk dilakukan segera untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar.
2. Rehabilitasi Kawasan mangrove penting untuk segera dilakukan. Spesies mangrove yang direkomendasikan yaitu rhizophora dan api-api. Lokasi yang utama untuk dilakukan penanaman mangrove yaitu pada saluran masuk air kedalam tambak yang terdapat disepanjang pesisir kabupaten Pinrang. Muara sungai juga penting untuk dilakukan penanaman mangrove jenis Nipah untuk menghambat sedimen yang terbawa kelaut.
3. Upaya rehabilitasi lahan-lahan kritis, terutama pada hulu DAS Saddang perlu segera dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi yang lebih besar. Sistem pertanian masyarakat pada Kawasan hulu das perlu dirubah dari pertanian semusim menjadi pertanian tahunan. Komoditi tanaman keras yang dapat diberikan kepada masyarakat haru mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tanaman yang dianjurkan yaitu tanaman yang menghasilkan buah. Tanaman yang nilai ekonominya berasal dari kayu (jati, sengon, dll) tidak dianjurkan untuk ditanam pada daerah hulu sungai. Untuk sempadan sungai sebaiknya ditanami tanaman yang mampu menahan tanah dengan baik seperti bambu.
4. Perlu diprogramkan pembuatan hutan kota di Kabupaten Pinrang dengan skala yang lebih luas.
5. Daerah-daerah terbuka dengan kemiringan lebih dari 75% dianjurkan untuk ditanami tanaman keras dengan pola terasering untuk menghambat erosi.
6. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu melakukan perencanaan dan membangun program penghijauan yang disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi agar program penghijauan lebih berhasil.
7. Program penghijauan berbasis masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menyukseskan program penghijauan di Kabupaten Pinrang.

## PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

CV. Meuthia Multi Konsultan, Tahun 2018

Fokus pembangunan di Kabupaten Pinrang sesuai RPJP tahun 2019 - 2029 pada pengembangan kawasan agropolitan. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnisnya serta mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Tujuan utama pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan. Secara khusus, tujuan PKA adalah :

- a. Mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah;
- b. Mengurangi kesenjangan antara kota dan desa;
- c. Mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat;
- d. Mengurangi kemiskinan;
- e. Mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, dan
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui:

Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan :

- a. Penguatan kelembagaan petani;
- b. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran, dan penyediaan jasa);
- c. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu;
- d. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
- e. Peningkatan sarana prasarana meliputi : jaringan jalan termasuk jalan usaha tani (farm road), irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah, dan sampah;
- f. Peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sarana-prasarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya.

Gerakan dan partisipasi aktif masyarakat (baik petani, penyedia agroinput, pengolah hasil, pemasaran dan penyedia jasa) yang di fasilitasi Pemerintah melalui dana stimulan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat, yang diarahkan untuk membiayai sarana dan prasarana yang bersifat publik dan strategis, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat tani pada kawasan agropolitan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pinrang terbagi dalam 8 kawasan sebagai berikut :

Kawasan Agropolitan Kabupaten Pinrang

NO	NAMA KAWASAN	DESA/KEL.	KECAMATAN	KOMODITI ANDALAN
1	SIPUNDANG	Sipatuo	Patampanua	Bawang, Cabe, Mangga, Pisang, Sapi, kakao, Kelapa, Beras Sehat, Jagung, talas tikus
		Malimpung		
		Padang Loang		
2	BALISU	Basseang	Lembang	kakao, Kopi, Padi, Palawija, Sapi dan Tanaman Hortikultura
		Letta		
		Suppirang		
3.	WALIMA	Watangpulu	Suppa	Sapi, Ayam Ras, Nenas, Nangka, Palawija dan Hortikultura
3.	WALIMA	Watangpulu	Suppa	Sapi, Ayam Ras, Nenas, Nangka, Palawija dan Hortikultura
		Alitta	Mattiro Bulu	
		Makkawaru	Mattiro Bulu	
		Amassangang	Lanrisang	
4	MASSAMPA	MattunruM Tunrue	Cempa	Padi, Jagung, Pepaya, Sapi, Palawija dan Hortikultura
		Siwolong Polong	Mattiro Sompe	
		Sikkuale	Cempa	
		Samaenre	Mattiro Sompe	
		MattongangM Tongang	Mattiro Sompe	
		Maccorawalie	Watang Sawitto	
		Marannu	Mattiro Bulu	
		Padakkalawa	Mattiro Bulu	
5	MATEPPO	Mattiro Ade	Patampanua	Padi, Jagung dan Ayam Ras
		Tonyamang		
		Pincara		
		Teppo		
6	TIROANG	Marawi	Tiroang	Padi, Jagung dan Salak
		Mattiro Deceng		
		Fakkie		
		Pammase		
7	BITTOENG	Tiroang	Duampanua	Padi, Sapi, Salak, Palawija dan Hortikultura lainnya
		Bittoeng		
8	KASSA	Kassa	Batulappa	kakao, Jagung, Durian, Langsat dan Rambutan

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, 2018

## PERMASALAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pinrang hingga saat ini masih dijumpai berbagai kendala baik dari sisi penerapan regulasi, pembinaan, kapasitas SDM, kelembagaan, dan teknologi. Penjabaran mengenai permasalahan dalam pembangunan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pinrang antara lain :

- Payung hukum belum sepenuhnya menjadi acuan penetapan kegiatan hortikultura

Berbagai regulasi terkait tanaman pangan dan hortikultura mempunyai dampak positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas pertanian.

- Pembinaan teknis belum optimal

Salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya produksi, produktivitas dan kualitas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pinrang adalah belum optimalnya pembinaan teknis.

- Kapasitas SDM belum memadai

Kapasitas SDM yang kompeten, komitmen, berdedikasi dan terintegrasi dirasa masih belum mampu memberi energi pada percepatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pinrang.

- Kelembagaan hortikultura masih lemah

Petani hortikultura masih memiliki daya tawar yang lemah dibanding pelaku usaha lainnya. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya fungsi atau peran dari kelembagaan hortikultura (Poktan, Gapoktan, Asosiasi). Kesadaran petani untuk berkelompok masih rendah serta peran dari beberapa kelembagaan yang sudah terbentuk (sebagai contoh : Dewan Hortikultura Nasional, Asosiasi Eksportir dan Importir, koperasi dan lainnya) masih lemah.

- Penerapan inovasi teknologi belum optimal

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pinrang sangat bergantung pada inovasi dan penerapan teknologi. Sampai saat ini banyak petani yang masih menggunakan teknologi konvensional.

## ROADMAP PEMBANGUNAN PENINGKATAN KEDUDUKAN DAN KUALITAS PERAN PEREMPUAN BERBASIS KELEMBAGAAN KABUPATEN PINRANG

CV. Lestari Global Resource, Tahun 2018

### LATAR BELAKANG

Isu gender merupakan salah satu hal penting dalam memproyeksi pembangunan, ini dikarenakan semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan. Hampir seluruh paradigma pembangunan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai faktor utama pembangunan. Paradigma-paradigma tersebut mensyaratkan bahwa kepentingan lapisan masyarakat yang beresiko, terutama kaum perempuan agar menjadi perhatian.

Sebagai gambaran umum secara sederhana kondisi kualitas perempuan Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada data statistik tahun 2017 yang menunjukkan :

1. Penduduk perempuan yang buta huruf sekitar 12,93 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang buta huruf sekitar 9,02 persen.
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 38,54 persen dibandingkan dengan laki-laki 9,02 persen.
3. Di bidang politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif, namun hasil pemilu 2014 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPRD yakni hanya 10 persen.
4. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat Eselon I, II dan III.

Fakta-fakta tersebut sedikit banyak menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, maka arah kebijakan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 urusan peningkatan kualitas dan peran perempuan antara lain diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berperspektif gender, meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar arah kebijakan yang dimaksud dapat dicapai dengan maksimal maka diperlukan panduan dalam pelaksanaannya. Berpijak dari hal tersebut, gagasan untuk menyusun panduan berupa Road Map Pembangunan Peningkatan Kedudukan dan Kualitas Peran Perempuan Berbasis Kelembagaan di Kabupaten Pinrang ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan yang urgen, khususnya bagi Pemerintah Daerah agar kesetaraan gender bisa menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER

1. Peran Perempuan di Lembaga Pemerintahan;
2. Peran Perempuan di Bidang Politik;
3. Peran Perempuan di Bidang Hukum.

### KESIMPULAN

1. Komitmen politik yang semestinya dituangkan dalam regulasi daerah yang untuk pengarusutamaan gender di Pinrang masih relatif terbatas.
2. Konsep gender sudah dipahami oleh para perencana pembangunan, akan tetapi implementasi gender sebagai suatu alat analisis yang dapat digunakan sebagai dasar pembangunan berperspektif gender baru diterapkan pada SKPD yang tupoksinya

- pemberdayaan dan perlindungan perempuan, padahal SKPD lainnya, terutama yang terkait bidang dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pendidikan dan kesehatan, sangat penting untuk mengimplementasikan alat analisis tersebut.
3. Dilihat dari unit kerja dan struktur fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang telah memiliki satu unit kerja khusus yang menangani PUG yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan.
  4. Ketersediaan sumber daya manusia yang responsif gender relatif belum cukup dimiliki oleh SKPD, demikian pula dari penganggaran/pendanaan.
  5. Sistem informasi yang responsif gender belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dokumen perencanaan kabupaten dan SKPD belum mengacu pada data terpilah.
  6. Mayoritas satuan kerja pemerintah kabupaten pinrang belum menerapkan alat analisis gender dalam perencanaan pembangunan.
  7. Tidak terdapat data tentang dukungan masyarakat sipil/madani yang ikut mendukung program pembangunan responsif gender atau penguatan PUG di Kabupaten Pinrang.

#### SARAN

1. Menyediakan regulasi tingkat kabupaten sebagai payung hukum pelaksanaan PUG dengan membentuk Perda tentang PUG dalam pembangunan yang member jaminan bahwa seluruh tahapan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja dan kelompok masyarakat bersifat responsif gender sehingga akan memiliki daya untuk meningkatkan kualitas perempuan di kabupaten Pinrang dan pada gilirannya berkontribusi signifikan bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender.
2. Membuat konsep peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan berupa program pemerintah daerah yang akan mendorong upaya pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi perempuan sebagai individu untuk menjadi otonom dan dapat membuat keputusan mandiri yang akan mengubah elemen relasi kekuasaan timpang yang berlaku selama ini menjadi setara dan adil.
3. Penting untuk melakukan proses penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan yang responsif gender oleh semua satuan kerja.
4. Perlu membentuk focal point gender di semua satuan kerja agar semua program dan kegiatan satuan kerja menjadi responsif gender.
5. Melakukan sosialisasi dan diklat PUG secara berkala dan berkesinambungan sehingga tersedia sumber daya manusia dalam jumlah yang memadai untuk melakukan proses perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender oleh semua satuan kerja.
6. Menyediakan data terpilah dan sistem informasi yang responsif gender agar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan didasarkan pada data yang akurat dengan indikator-indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Semua satuan kerja menerapkan analisis gender pada proses perencanaan pembangunan.
8. Menggalang dukungan yang luas dari kelompok masyarakat sipil demi pelaksanaan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Pinrang.
9. Memaksimalkan mekanisme implementasi program-program pemerintah yang mendorong terjadinya peningkatan kualitas peran dan kedudukan perempuan dalam percepatan pembangunan daerah.

## MASTERPLAN JALAN PERKOTAAN

Puslitbang Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018

### LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur, terutama Jaringan jalan adalah salah satu Prioritas utama pembangunan di Kabupaten Pinrang. Infrastruktur jalan diharapkan dapat menggerakkan sektor ekonomi agar terus meningkat. Infrastruktur jalan berpengaruh besar terhadap distribusi barang/produk yang menghidupkan perputaran ekonomi. Infrastruktur jalan perkotaan memiliki isu tambahan, yakni meluasnya kemacetan dan meningkatnya polusi udara. Saat ini kondisi jalan-jalan perkotaan sudah mulai merisaukan masyarakat.

### TUJUAN

- a. Menganalisis kondisi existing jalan untuk mengetahui besaran permasalahan di Kawasan perkotaan kab. pinrang.
- b. Menganalisis proyeksi kebutuhan jalan pada masa yang akan datang di Kawasan perkotaan.
- c. Menyediakan informasi jaringan jalan perkotaan yang memadai untuk dijadikan dasar dalam penanganan jalan
- d. Menyediakan konsep pembangunan jalan perkotaan pada jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Kebijakan dan Strategi Rencana Pengembangan jaringan pergerakan yang ingin dicapai adalah :

1. Kebijakan, Berorientasi pada peningkatan aksesibilitas antar Kawasan, mengedepankan keselamatan dan kenyamanan serta manusiawi.
2. Strategi, Pengembangan transportasi Kawasan perkotaan Pinrang diarahkan pada upaya :
  - a. Mengoptimalkan jaringan jalan eksisting dibagian wilayah perkotaan Pinrang;
  - b. Mengembangkan sistem jaringan dengan membuka akses dari dan ke wilayah sekitarnya, dalam upaya mendukung kelancaran fungsi-fungsi ekonomi dan sosial budaya, serta untuk mendukung pusat permukiman utama serta zona industri baru dan zona ekonomi lainnya;
  - c. Peningkatan antara moda, laut dan darat;
  - d. Penyediaan sistem transportasi yang cepat dan aman;
  - e. Penyediaan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau.

## RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)

PT. Geo Inti Spasial, Tahun 2018

### LATAR BELAKANG

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh khususnya dalam konteks perkotaan hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi seperti tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat berskala kabupaten/kota dan berbasis Kawasan, belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun Kawasan penanganan permukiman kumuh skala kota.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka suatu kabupaten sudah seharusnya memiliki instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik.

### TUJUAN

- a. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan Kawasan permukiman dalam suatu profil Kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati;
- b. Menyusun Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (Community Action Plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten melalui pelibatan Masyarakat (Lembaga Masyarakat/BKM/KSM) dalam Proses pembangunan dan pemeliharaan lingkungan;
- c. Menyusun kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh Kabupaten secara operasional dalam mewujudkan zero permukiman kumuh;
- d. Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi Kawasan, Menyusun indikasi program dan kegiatan penanganan Kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku dan tertuang dalam nota kesepakatan Bersama.

### SASARAN

- a. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas bagi Kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Bupati Pinrang;
- b. Rencana Pencegahan dan peningkatan Kawasan kumuh ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan Kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik;
- c. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor keciptakaryaan melalui kegiatan regular sektoral;
- d. Terciptanya keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari strategi pengurangan luasan Kawasan permukiman kumuh.

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Puslitbang Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018

### LATAR BELAKANG

Tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mendorong Pemerintah yang baik mendorong pemerintah untuk segera melakukan proses reformasi birokrasi. Upaya ini salah satunya tercermin dari kebijakan reformasi birokrasi yang telah digulirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan adalah Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi pada proses-proses kerja di Pemerintahan sesungguhnya telah berjalan lama dan menjadi kebutuhan yang penting.

Dokumen Kebijakan Pengembangan TIK ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arahan bagi pengelola Sumber Daya Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) di Pemerintahan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan pengembangan teknologi informasi komunikasi.

### TUJUAN

- a. Tersedianya informasi terkini tentang perkembangan teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Pinrang;
- b. Tersusunnya Dokumen kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Pinrang.

### SASARAN

- a. Teridentifikasinya kondisi terkini terkait pengembangan kebijakan teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Pinrang;
- b. Tersusunnya Dokumen kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi kabupaten.

### REKOMENDASI

- a. Penambahan Anggaran;
- b. Pengadaan pelatihan dan workshop untuk pengembangan TIK;
- c. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dalam Bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
- d. Penambahan sarana prasarana yang mendukung Teknologi Informasi Komunikasi.

## KAJIAN REVITALISASI KAWASAN WISATA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

Muhammad Hatta Fattah dan Siti Rahbiah Busaeri, Tahun 2019

### LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan yang secara luas diterjemahkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Peran penting sektor pariwisata adalah mengemban tugas menghasilkan devisa bagi negara dan menjadi stimulus percepatan kemajuan daerah.

Pariwisata Kabupaten Pinrang sedang dalam fase inisiasi (start up) dan pertumbuhan (growth). Belum tergalinya potensi wisata Kabupaten Pinrang secara optimal disebabkan oleh adanya berbagai masalah diantaranya :

- Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi;
- Minimnya promosi dan penyebaran ODTW kepada wisatawan;
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang pariwisata;
- Rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dan aparat terkait;
- Kurangnya diversifikasi produk dan paket wisata.

Kawasan Wisata Waetuo merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Waetuo pernah menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal, namun praktek premanisme, kondisi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif menyebabkan jumlah pengunjung terus menurun secara drastis dan mengalami stagnasi.

### KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEPSI PENGEMBANGAN

#### Ekowisata

Menurut The International Ecotourism Society atau TIES (1991) bahwa Ekowisata adalah perjalanan jasa wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonversi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal (Nugroho, 2011).

#### Konsepsi Desa Wisata

Teori strukturisasi Giddens melihat mengenai timbal balik antara agen dan struktur serta menekankan pada kesadaran dan rasionalitas antara agen dan struktur (Giddens, 2010). Agen dalam hal ini adalah seluruh masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan wisata baik secara langsung maupun tidak langsung sedangkan struktur merupakan keseluruhan sumberdaya dan aturan yang ada.

#### Daya Tarik Usaha

Hasil penelitian dari Byczek (2010) menunjukkan bahwa jaringan ekowisata desa adalah salah satu diantara beberapa insiatif yang telah didirikan dalam rangka mencari keuntungan dari pembangunan pariwisata bagi pemerintah dan masyarakat lokal dengan tetap menjamin keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial.

#### Strategi dan Pengembangan Daya Tarik Wisata

Menurut Yoeti (1997), pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu:

- a. Wisatawan (Tourist);
- b. Transportasi;
- c. Atraksi/Obyek Wisata;
- d. Fasilitas Pelayanan.

#### Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Natori (2001), konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat menekankan pada : 1) terpeliharanya mutu dan berkelanjutan, 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, 3) terwujudnya keseimbangan antara sumber daya alam dan budaya, 4) kesejahteraan masyarakat lokal dan kepuasan wisatawan.

#### Siklus Hidup Area Wisata

Menurut pendapat Buttler dalam Pitana (2005) bahwa siklus hidup area wisata terbagi atas tujuh fase yaitu :

1. Tahapan Exploration;
2. Involvement phase (keterlibatan);
3. Development phase (pembangunan);
4. Consolidation phase (konsolidasi);
5. Stagnation phase (stagnasi);
6. Decline phase (penurunan);
7. Rejuvenation phase (peremajaan).

#### Potensi Daya Tarik Wisata

Potensi pengembangan kawasan wisata didasarkan pada sejumlah aspek yang mempengaruhi peningkatan angka dan lama kunjungan wisata. Dimensi yang mendorong peningkatan angka dan lama kunjungan wisatawan meliputi ketersediaan aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan serta atraksi dan pertunjukan seni dan budaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan angka dan lama kunjungan wisatawan meliputi daya tarik objek wisata, kegiatan yang dilakukan selama kunjungan wisatawan, apanorama dan pertunjukan yang dapat dilihat, sesuatu yang bisa dibagikan dengan kerabat serta benda atau cenderamata yang dapat dibeli pengunjung.

#### Arah Kebijakan Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan

Revitalisasi kawasan melalui pembentukan lembaga, pengurus dan program kerja Pokdarwis diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah kebiasaan masyarakat seperti buang sampah sembarangan, konflik kepentingan dan tindakan pemerasan yang bertentangan dengan Sapta Pesona. Program kerja Pokdakan di Kecamatan Lanrisang disinkronkan dengan program kerja Pokdarwis yang bertujuan mewujudkan Sapta Pesona yang terdiri dari tujuh unsur yakni keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan ketenangan. Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

Berdasarkan hasil analisis perangkat RAFFISH, ditemukan lima atribut yang bersifat kritis dalam pengembangan Kawasan Wisata Waetueo yakni 1) Daya tarik, 2) Tingkat pemanfaat objek, 3) Strategi pemanfaatan objek, 4) Kesiapan masyarakat dan Pemda, serta 5) Sumber informasi objek. Modal dasar yang dimiliki Kawasan Wisata Waetueo adalah dengan memadainya dua atribut yakni 1) Aksesibilitas dan 2) Potensi pengembangan dan dampak lingkungan.

#### Konsepsi Operasional Pengembangan Kawasan

Peningkatan daya tarik Kawasan Wisata Waetueo dapat dikembangkan dengan pembuatan Master Plan Pengembangan yang meliputi aspek penataan kawasan pesisir, peningkatan kebersihan, penataan toilet, penanaman pohon peneduh, pembuatan track sepeda dan jogging, penataan kolam Waetueo, pemanfaatan air panas, lomba layang layang, paket wisata berbasis sejarah, pondokan, outbond dan kemah pemuda, Pelibatan penuh pemerintah desa melalui BUMDes selaku pengelola objek wisata, peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pendampingan tenaga ahli.

#### KESIMPULAN

1. Kawasan Wisata Waetueo memiliki keunggulan dan daya tarik dari aspek panorama alam, kuliner, budaya, sejarah dan potensi pengobatan alternatif.
2. Potensi daya tarik kawasan terdegradasi disebabkan stagnasi pengelolaan selama sekitar empat tahun serta keberadaan sampah, bau tidak sedap, kotoran ternak, coretan-coretan dan gangguan Kamtibmas yang menyebabkan gangguan dan ketidaknyamanan wisatawan.
3. Dimensi yang memerlukan perhatian secara seksama dalam merevitalisasi kawasan yakni daya tarik, tingkat pemanfaatan objek, strategi pengembangan, kesiapan masyarakat dan Pemda serta sumber informasi objek.
4. Dukungan aksesibilitas serta potensi pengembangan dan minimnya dampak lingkungan menjadi kekuatan utama pengembangan Kawasan Wisata Waetueo.
5. Pengembangan Kawasan Wisata Waetueo mengacu pada lima tema utama yakni kuliner, ikan hidup, spot foto, desa wisata pesisir, pengobatan dan keunggulan panorama alam yang selanjutnya menjadi kerangka visi pengembangan kawasan yakni "Desa Wisata Terbaik di Kabupaten Pinrang dengan Keunggulan Kuliner Berbahan Utama Ikan Hidup, Spot Foto Terbaik dan Penyedia Layanan Pengobatan Alternatif 2025.

#### REKOMENDASI

1. Penataan Kawasan Wisata Waetueo memerlukan pembenahan secara menyeluruh meliputi aspek pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, kebijakan dan strategi promosi yang efektif.
2. Revitalisasi menekankan pada terciptanya kawasan wisata yang bersih, asri, ramah, nyaman dan aman bagi wisatawan.
3. Strategi revitalisasi kawasan berbasis masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
4. Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2020 menjadi momentum Revitalisasi Kawasan Wisata Waetueo dengan prakondisi momen revitalisasi pada penyambutan Tahun Baru 2020.
5. Pengembangan kawasan memerlukan dukungan sejumlah perangkat kebijakan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata.

## PEMETAAN EKONOMI KOMODITAS PERKEBUNAN UTAMA

CV. Lestari Global Resource, Tahun 2019

### LATAR BELAKANG

Dalam 25 tahun terakhir, subsektor perkebunan merupakan salah satu bisnis strategis dan andalan dalam perekonomian Indonesia, bahkan pada masa krisis ekonomi. Agribisnis subsektor ini mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penerimaan devisa dari ekspor, dan sumber bahan baku bagi industri hilir hasil pertanian. Areal dan produksi komoditas perkebunan pada 25 tahun terakhir secara konsisten terus meningkat. Dengan total areal perkebunan lebih dari 13.4 juta ha, jumlah tenaga kerja yang terserap pada subsektor perkebunan diperkirakan mencapai lebih dari 13 juta orang. Karena berbasis pada sumberdaya domestik, komoditas perkebunan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

### TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Tujuan penyusunan dokumen Pemetaan Ekonomi Komoditas Perkebunan Utama Kabupaten Pinrang yaitu untuk mengetahui potensi ekonomi pengembangan komoditi perkebunan sehingga dapat menunjang perekonomian Kabupaten Pinrang. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- Sebagai acuan pemerintah daerah dalam mendorong investasi pada sub sektor perkebunan;
- Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan daerah, terutama pada sektor perkebunan;

### KESIMPULAN

Komoditi perkebunan masih menjadi salah satu penyumbang ekonomi masyarakat terbesar di Kabupaten Pinrang. Komoditi perkebunan yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Pinrang yaitu kakao, kelapa, jambu mete, kemiri dan kopi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa komoditi perkebunan lainnya yang diusahakan masyarakat namun dalam luasan dan produksi yang kecil seperti kelapa sawit, cengkeh, pala dan vanili. Secara umum, berdasarkan hasil analisis ekonomi yang meliputi analisis NPV, IRR, BC Ratio, PP dan BEP menunjukkan bahwa komoditi kakao, kelapa, jambu mete, kemiri dan kopi sangat layak untuk dikembangkan di Kabupaten Pinrang. Sedangkan untuk komoditi kelapa sawit, kurang layak untuk dikembangkan di Kabupaten Pinrang karena tidak adanya sarana pendukung pengolahan kelapa sawit serta luas lahan yang dibudidayakan masyarakat terlalu kecil untuk skala ekonomi. Untuk memudahkan masyarakat dan investor dalam penilaian kelayakan ekonomi pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Pinrang telah dibangun aplikasi berbasis android terkait hal tersebut. Pengguna hanya perlu memasukkan informasi terkait harga jual dan biaya dalam budidaya komoditi perkebunan. Aplikasi tersebut akan menunjukkan hasil analisis kelayakan ekonomi pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Pinrang termasuk didalamnya nilai NPV, IRR, Payback Period, EUAW dan grafik Break Event Point.

### REKOMENDASI

Hasil studi Pemetaan Ekonomi Komoditas Perkebunan Utama di Kabupaten Pinrang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Pembangunan pertanian di Kabupaten Pinrang, khususnya untuk komoditi perkebunan utama (kakao, kelapa, jambu mete, kemiri dan kopi) perlu memperhatikan tingkat kesesuaian lahan pengembangan komoditi tersebut.

- Pengembangan pusat-pusat produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Pinrang sebaiknya memperhatikan hasil analisis Location Quotient sehingga akan lebih mudah dalam penataan sistem agribisnis komoditi perkebunan di Kabupaten Pinrang.
- Perlu adanya pendampingan dari pemerintah dalam upaya pengembangan perkebunan di Kabupaten Pinrang terutama dalam hal upaya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait budidaya komoditi perkebunan.
- Pemerintah perlu aktif mensosialisasikan aplikasi kelayakan ekonomi perkebunan disertai dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait kelayakan ekonomi pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Pinrang.

## RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PANGAN DAN GIZI

PT. Mareto Agri Persada, Tahun 2019

Untuk mencapai skala ekonomi di 1 (satu) kawasan kabupaten/kota untuk padi minimal 5.000 Ha, dengan luas sawah di Kabupaten Pinrang yang mencapai 55.111 Ha atau 11 kali luas minimal tersebut, maka sangat layak dibentuk beberapa Kawasan Tanaman Pangan Padi. Bahkan terdapat enam kecamatan yang memiliki luas lahan minimal untuk pembentukan Kawasan Tanaman Pangan Padi, yaitu :

- Kecamatan Duampanua memiliki luas sawah tertinggi yang mencapai 7.664 Ha (13,91%), terdiri dari sawah beririgasi seluas 6.606 Ha (14,01%) dan sawah tadah hujan seluas 1.058 Ha (13,27%);
- Kecamatan Patampanuan dengan luas sawah 6.722 Ha (12,29%), terdiri dari sawah beririgasi seluas 4.383 Ha (9,30%) dan sawah tadah hujan seluas 2.389 Ha (29,97%);
- Kecamatan Mattiro Bulu dengan luas sawah 5.919 Ha (10,74%), terdiri dari sawah beririgasi seluas 4.798 Ha (10,18%) dan sawah tadah hujan seluas 1.121 Ha (14,06%);
- Kecamatan Tiroang dengan luas sawah 5.683 Ha (10,31%) dan semuanya sawah beririgasi;
- Kecamatan Cempa dengan luas sawah 5.600 Ha dan semuanya sawah beririgasi; serta
- Kecamatan Mattiro Sompe dengan luas sawah 5.132 Ha (9,31%) dan semuanya sawah beririgasi.

Program pengembangan Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Pinrang dibagi menjadi empat, bidang, yaitu :

1. Pengembangan Subsistem Hulu;
2. Pengembangan Subsistem Produksi atau On-farm;
3. Pengembangan Subsistem Hilir;
4. Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Penunjang..

Program-program tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk masing-masing kawasan padi dan Kawasan jagung, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan masing-masing kawasan pertanian untuk komoditas tersebut di Kabupaten Pinrang.

Keberadaan sawah beririgasi seluas seluas 47.139 Ha atau mencapai 85,5% dari keseluruhan luas sawah di Kabupaten Pinrang, tidak terlepas dari keberadaan Bendungan Benteng, yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Patampanua, merupakan bendungan sebagai sumber air irigasi teknis yang mengairi sawah seluas  $\pm$  42.931 Ha. Berdasarkan data tersebut, pada Tahun 2017 Kecamatan Duampanua memiliki luas sawah tertinggi yang mencapai 7.664 Ha (13,91%), terdiri dari sawah beririgasi seluas 6.606 Ha (14,01%) dan sawah tadah hujan seluas 1.058 Ha (13,27%). Diikuti oleh Kecamatan Patampanuan dengan luas sawah 6.722 Ha (12,29%), terdiri dari sawah beririgasi seluas 4.383 Ha (9,30%) dan sawah tadah hujan seluas 2.389 Ha (29,97%), Kecamatan Mattiro Bulu dengan luas sawah 5.919 Ha (10,74%), terdiri dari sawah beririgasi seluas 4.798 Ha (10,18%) dan sawah tadah hujan seluas 1.121 Ha (14,06%), Kecamatan Tiroang dengan luas sawah 5.683 Ha (10,31%) dan semuanya sawah beririgasi, Kecamatan Cempa dengan luas sawah 5.600 Ha dan semuanya sawah beririgasi, Kecamatan Mattiro Sompe dengan luas sawah 5.132 Ha (9,31%) dan semuanya sawah beririgasi. Keenam kecamatan tersebut memiliki luas sawah di atas 5.000 Ha. Enam kecamatan lainnya juga memiliki luas sawah yang cukup luas, dan yang terkecil adalah Kecamatan Suppa dengan luas sawah 1.488 Ha (2,70%) terdiri dari

sawah beririgasi seluas 1.007 Ha (2,30%) dan sawah tadah hujan seluas 481 Ha (6,03%).

Kawasan Kambing/Domba Pinrang dibagi menjadi dua Kawasan, yaitu : (1) Kawasan Kambing/Domba Pinrang I yang meliputi wilayah Kecamatan Suppa, Mattiro Sompe, Lanrisang, Mattirobulu, Watang Sawitto dan Tiroang, dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 21.316 ekor; dan (2) Kawasan Kambing/Domba Pinrang II yang meliputi wilayah Kecamatan Patampanua, Cempa, Duampanua, Batulappa dan Lembang, dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 14.350 ekor.

Kawasan Kambing/Domba Pinrang I yang meliputi wilayah :

1. Kecamatan Suppa (10 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 6.035 ekor, dan direncanakan terdapat 10 Gapoknak;
2. Kecamatan Mattiro Sompe (9 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 6.053 ekor, dan direncanakan terdapat 9 Gapoknak;
3. Kecamatan Lanrisang (7 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 4.450 ekor, dan direncanakan terdapat 7 Gapoknak;
4. Kecamatan Mattiro bulu (9 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 2.800 ekor, dan direncanakan terdapat 9 Gapoknak;
5. Kecamatan Watang Sawitto (8 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 2.800 ekor, dan direncanakan terdapat 3 Gapoknak; serta
6. Kecamatan Tiroang (5 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Kambing/Domba pada Tahun 2017 sebanyak 990 ekor, dan direncanakan terdapat 3 Gapoknak;

Kawasan Ayam Buras Pinrang I yang meliputi wilayah :

1. Kecamatan Suppa (10 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Ayam Buras pada Tahun 2017 sebanyak 104.400 ekor, dan direncanakan terdapat 10 Gapoknak;
2. Kecamatan Mattiro Sompe (9 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Ayam Buras pada Tahun 2017 sebanyak 135.045 ekor, dan direncanakan terdapat 9 Gapoknak;
3. Kecamatan Lanrisang (7 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Ayam Buras pada Tahun 2017 sebanyak 210.000 ekor, dan direncanakan terdapat 7 Gapoknak;
4. Kecamatan Mattiro bulu (9 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Ayam Buras pada Tahun 2017 sebanyak 197.500 ekor, dan direncanakan terdapat 9 Gapoknak;
5. Kecamatan Paleteang (6 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Ayam Buras pada Tahun 2017 sebanyak 160.000 ekor, dan direncanakan terdapat 6 Gapoknak;
6. Kecamatan Tiroang (5 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Ayam Buras pada Tahun 2017 sebanyak 173.100 ekor, dan direncanakan terdapat 5 Gapoknak; dan
7. Kecamatan Watang Sawitto (8 Desa/Kelurahan) dengan total populasi Ayam Buras pada Tahun 2017 sebanyak 14.300 ekor, dan direncanakan terdapat 1 Gapoknak.

Dengan demikian, Kawasan Ayam Buras Pinrang I yang mencakup 7 Kecamatan direncanakan memiliki 47 Gapoknak.

Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani :

Dalam menginisiasi pembentukan Kelembagaan Petani menjadi kelembagaan Korporasi Petani, ditopang oleh sekurang-kurangnya lima aspek utama, yang mencakup:

1. Konsolidasi Petani ke dalam Kelembagaan Ekonomi Petani Berbadan Hukum;
2. Aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik;
3. Aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern;
4. Konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern; dan
5. Aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi.

## RENCANA AKSI UMKM DAN KOPERASI

CV. Meuthia Multi Konsultan, Tahun 2019

Tujuan Program Pengembangan UKM dan Koperasi dapat tercapai apabila mendapatkan kontribusi penuh dari dukungan dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM serta semua pemangku kepentingan dalam upaya Pengembangan UKM dan Koperasi di Kabupaten Pinrang. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan UKM Koperasi pada program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang.

### Program Pengembangan Koperasi dan UKM

Dalam tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang telah melaksanakan Program Pengembangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.

Kesembilan program diatas dapat diukur penggunaan anggaran dari Rencana Anggaran Pokok pada Belanja Langsung sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) mengalami Perubahan Anggaran sebesar Rp. 1.720.350.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.657.384.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan persentase sebesar 96,26 %. Selama periode Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### SASARAN

Sasaran pengembangan UKM dan Koperasi yakni Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Indikator Pencapaian luaran tersebut pada tahun 2024 adalah:

1. Persentase Peningkatan Skala KUKM 90%;
2. Persentase Persentase KUMKM yang layak perbankan 90%;
3. Persentase Koperasi Aktif 100%.

- Tujuan Program Pengembangan UKM dan Koperasi dapat tercapai apabila mendapatkan kontribusi penuh dari dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM serta semua pemangku kepentingan dalam upaya Pengembangan UKM dan Koperasi di Kabupaten Pinrang. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan UKM Koperasi pada program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang.

- Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengembangan UKM dan Koperasi Kabupaten Pinrang, maka terhadap Rencana Aksi Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM ini dapat dilakukan penyesuaian.
- Dengan disusunnya Rencana Aksi Pengembangan UKM dan Koperasi Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya.
- Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan UKM dan Koperasi sangat diharapkan agar tujuan dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pinrang secara menyeluruh dapat tercapai.

#### PERMASALAHAN KEGIATAN

Tantangan pembangunan ekonomi Indonesia pada periode 2020-2024 adalah bagaimana mencapai kesejahteraan rakyat yang tinggi melalui peningkatan pendapatan rakyat secara menyeluruh melalui penciptaan aktifitas ekonomi dan lapangan kerja. Oleh karena itu, penghapusan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi arah pembangunan ekonomi. Proses pembangunan yang inklusif menjadi cara tepat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dimana KUMKM menjadi titik sentral dalam kerangka sektor riil dan dunia usaha. Peningkatan peran KUMKM akan dapat menurunkan parameter indikator perekonomian agregat tersebut untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% dengan tingkat inflasi dibawah 3% per tahun, zeropoverty, dan Gini Ratio yang mendekati nol.

Dalam menjadikan KUMKM sebagai kekuatan utama perekonomian Indonesia, secara institusional, membangun sistem perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen keempat tentang perekonomian Indonesia. Pada Ayat 5 dinyatakan secara jelas bahwa sistem perekonomian nasional harus diatur oleh Undang-Undang (UU) untuk mengimplementasikan demokrasi ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah juga menghadapi tantangan berupa peningkatan produktivitas KUMKM dan daya saing produk. Produk KUMKM belum banyak masuk dalam Global Value Chain. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia terendah dibandingkan negara Singapore, Malaysia, Thailand, Philipinnes, dan Vietnam akibat selain kurangnya pemahaman mengkasas pasar internasional juga akibat tidak memiliki sertifikasi standar produk. Vietnam dewasa ini telah mengambil posisi Indonesia dalam perekonomian internasional TPT (textile and product textile), WPW (wood and product wood), dan perkopian.

Tantangan lainnya adalah mendorong kegiatan usaha pada sektor produksi/manufaktur dan industri kreatif karena saat ini sebagian besar kegiatan usaha disektor perdagangan retail. Tantangan lainnya adalah memperbaiki ketimpangan struktur usaha UMKM. Sebagian besar unit usaha didominasi usaha mikro (lebih dari 62 juta) dan tersebar atau belum banyak membentuk klaster. Untuk itu, KUMKM harus mampu mengembangkan inovasi secara terus menerus. Inovasi dapat terwujud apabila penelitian dan peningkatan kapasitas juga berkesinambungan.

Identifikasi terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi dalam Pengembangan UKM dan Koperasi memungkinkan antisipasi dini terhadap tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Untuk itu, beberapa masalah yang berpotensi dihadapi kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Standar yg Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Prosentase jumlah pembentukan dan perubahan koperasi	Jumlah koperasi yang berbadan hukum masih rendah	Jumlah permohonan yang masuk	Masih rendahnya SDM aparat pembina yang memiliki skill dan kompetensi dalam menunjang prosentase jumlah pembentukan dan perubahan koperasi	Rendahnya pemahaman dan minat masyarakat dalam pembuatan Badan Hukum koperasi	Rendahnya pembinaan/sosialisasi tentang tata cara pembentukan koperasi
Prosentase jumlah Koperasi yang terbina dalam mengakses pembiayaan	Koperasi yang mendapatkan penguatan permodalan masih kurang	Realisasi pencairan kredit/bantuan	Kurangnya SDM aparatur dalam melakukan bimbingan penyusunan proposal	Lembaga keuangan belum sepenuhnya berpihak kepada ekonomi kerakyatan	Rendahnya pembinaan manajemen UMKM terutama akses kepada sumber-sumber permodalan
Prosentase jumlah Koperasi dan UKM yang mengikuti promosi	Mengikuti setiap event promosi dan pameran	Pameran tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional	Terbatasnya anggaran yang disediakan	Minat masyarakat untuk berperan aktif masih kurang	Minat masyarakat untuk berperan aktif masih kurangserta masih terbatasnya pemasaran produk para UKM
Prosentase jumlah KSP/USP Koperasi yang di bina	Meningkatnya KSP/USP yang berkategori sehat	Melakukan penilaian dan pengawasan terhadap KSP/USP	Masih terbatasnya SDM yang memiliki skill dalam menunjang peningkatan jumlah KSP/USP yang dibina	Masih terbatasnya kemampuan manajerial pelaku KSP/USP dalam mengelola usaha, dan permodalannya	Masih terbatasnya kemampuan manajerial pelaku KSP/USP dalam mengelola usaha, dan permodalannya
Prosentase jumlah pelayananper kantor dan pengelolaan serta pemeliharaan asset	Terpeliharanya gedung Kantor serta Tertibnya Administrasi keuangan	Monev	Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pelayanan perkantoran dan pengelolaan serta pemeliharaan asset	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pelayanan perkantoran dan pengelolaan serta pemeliharaan asset

## GRAND DESAIN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

PT. Adyaksa Mitra Utama, Tahun 2019

### PENDAHULUAN

Data tentang jumlah keluarga dan jiwa miskin di Kabupaten Pinrang pada kurun waktu enam terakhir ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Penurunan ini tak lepas dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan selama ini. Namun perlu disadari bahwa dinamika sosial politik yang berlangsung cepat, seiring dengan efek globalisasi yang luas telah menuntut pemerintah daerah untuk memperbaharui dan menyesuaikan strategi penanggulangan kemiskinan yang ditempuh dengan perkembangan aktual baik secara eksternal maupun internal yang terjadi. Disamping itu belum tersedianya basis data yang terunifikasi sebagai bahan rujukan bersama juga menjadi kendala yang harus segera diatasi. Sementara itu, metode pendataan yang digunakan masing-masing instansi selama ini tidak sama dan belum ada koordinasi antar pelaku, sehingga sering terjadi tumpang tindih program dan sasaran serta kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu disusun sebuah Grand Desain Penanggulangan Kemiskinan Daerah (GDPKD) Kabupaten Pinrang untuk lima tahun mendatang.

Maksud penyusunan GDPKD ini adalah untuk memetakan dan menganalisa faktor-faktor penyebab kemiskinan, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang sudah dan akan dilaksanakan serta mensinergikan upaya tersebut dengan berbagai pihak yang terlibat. Adapun tujuannya adalah : 1) mempertegas komitmen pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan, 2) membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar serta pendekatan partisipatif dan kemitraan dalam perumusan kebijakan dan strategi, 3) Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan MDGs, 4) Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak yang peduli.

Konsep kemiskinan yang digunakan dalam dokumen GDPKD ini adalah konsep kemiskinan absolut, yaitu dengan memakai ukuran yang biasa digunakan oleh Dinas Sosial selaku lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pendataan keluarga miskin. Terdapat 23 indikator yang digunakan dalam pendataan tersebut yang bersumber dari lima variabel yaitu : kerohanian, pangan, sandang, papan dan lingkungan sosial. Semakin banyak indikator yang dipenuhi suatu keluarga semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut, begitu pula sebaliknya.

### KONDISI GEOGRAFIS DAN KEPENDUDUKAN

Tinjauan terhadap karakteristik wilayah Kabupaten Pinrang secara makro dalam Grand Desain Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pinrang dimaksudkan untuk melihat wilayah Kabupaten Pinrang sebagai aspek yang ditinjau secara makro, meliputi aspek fisik wilayah, aspek kependudukan, aspek sumberdaya alam dan berbagai aspek lainnya.

### KONDISI DAN PENYEBAB KEMISKINAN

Berdasarkan hasil studi Evaluasi Indikator Kemiskinan, yang mempengaruhi jatuhnya keluarga kedalam kategori kemiskinan adalah karena penghasilan, jumlah kekayaan (aset), papan (tempat tinggal), sandang, kesehatan dan air bersih. Dari sini bisa dilihat bahwa aspek yang dinilai secara dominan adalah aspek ekonomi. Sedangkan aspek pendidikan, kesehatan (sosial) merupakan aspek yang mengikuti dari kurang tersedianya aspek penghasilan dan kekayaan ekonomi). Indikator kemiskinan dapat

dilihat dapat dilihat dari tiga dimensi yang dapat di breakdown dalam beberapa aspek yaitu :

1. Dimensi ekonomi, terbagi menjadi 6 aspek yaitu pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kompetensi, modal dan akses;
  2. Dimensi sosial, terbagi menjadi 3 aspek yaitu kesehatan, siklus hidup dan lingkungan;
  3. Dimensi fisik, terbagi menjadi 2 aspek yaitu rumah dan pakaian
- Analisis penyebab kemiskinan dalam dokumen GDPKD ini menggunakan pendekatan kombinasi kultural dan struktural. Faktor penyebab timbulnya kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu :
1. Faktor individu dengan indikator malas, kurang pergaulan, tidak memiliki pengalaman, minder, tidak mempunyai modal, keterampilannya rendah dan boros;
  2. Faktor kebijakan pemerintah dengan indikator pendapatan rendah, tidak ada lapangan kerja, harga sembako tinggi, pendidikan mahal, sarana dasar kurang dan biaya jasa mahal;
  3. Faktor alamiah dengan indikator bencana keluarga, jompo dan bencana alam.

#### KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dalam dokumen GDPKD Kabupaten Pinrang ini, strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 1) Perlindungan sosial, 2) Perluasan kesempatan, 3) Peningkatan sumber daya manusia, 4) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, dan 5) Penataan kemitraan global.

Di Kabupaten Pinrang, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada penggolongan klaster yang terdiri atas 3 klaster yaitu :

1. Klaster program penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis rumah tangga;
2. Klaster program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas;
3. Klaster program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil.

#### GRAND DESAIN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PINRANG 2019-2023

##### 1. Strategi Umum

Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah : 1) Perlindungan Sosial, dengan memberikan rasa aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin baru, 2) Penciptaan peluang berusaha, dengan strategi perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan strategi mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, 4) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, 5) Penataan kemitraan global, dengan strategi menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional.

##### 2. Strategi Khusus

Selain strategi umum, diperlukan juga strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan yaitu : 1) Revitalisasi dan replikasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2) Penguatan pendidikan mental keluarga miskin, 3) Memperkuat jejaring dengan berbagai pihak, 4) Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, 5) Mendorong dan mendukung pengembangan kelembagaan partisipasi publik, 6) Melindungi masyarakat dengan menyediakan pelayanan dasar, 7) Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah, 8) Meningkatkan kesetiakawanan sosial dengan menggali potensi dana masyarakat.

##### 3. Strategi Program

Dalam pengentasan kemiskinan diperlukan strategi mikro yang diharapkan menjadi strategi program yaitu :

- Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan;
- Program pengurangan beban hidup keluarga miskin;

- Pemberdayaan KK miskin;
- Sosialisasi peraturan tentang penanggulangan kemiskinan.

#### PENUTUP

Secara singkat Grand Desain Penanggulangan Kemiskinan Daerah (GDPKD) memuat :

1. Uraian tentang strategi penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua sektor;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan-kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Proses penyaringan strategi terpilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi daerah;
4. Proses penyusunan GDPKD yang dilakukan beberapa tahap bersama stakeholder melalui prinsip partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## GRAND DESAIN DAN DATABASE SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN PINRANG

PT. Geo Inti Spasial, Tahun 2019

### PENDAHULUAN

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas. Olahraga telah menjadi bagian hidup dari sebagian besar masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun di pelosok pedesaan yang digunakan sebagai salah satu sarana hiburan dan bertujuan agar masyarakat memiliki pola hidup sehat.

Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya.

Ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan prestasi olahraga, kedepan pemerintah kabupaten berharap pembangunan sarana dan prasarana olahraga harus berstandar nasional dan internasional. Oleh karena itu perlu grand desain dan database sarana dan prasarana olahraga yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan menampilkan data-data berupa jumlah sarana dan prasarana olahraga, termasuk ukuran, kepemilikan, pengelolaan, kelayakan fungsi riwayat dan sebagainya sesuai kebutuhan di Kabupaten Pinrang.

### TINJAUAN KEBIJAKAN WILAYAH

#### 1. Tinjauan RPJP Kabupaten Pinrang

- Visi Pembangunan Kabupaten Pinrang;
- Misi Pembangunan Kabupaten Pinrang;

#### 2. Tinjauan RTRW Kabupaten Pinrang

- Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Pinrang;
- Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pinrang;
- Arahan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pinrang;

#### 3. Tinjauan RPJMD Kabupaten Pinrang

- Aspek Pelayanan Umum  
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah.
- Aspek Kesejahteraan Masyarakat  
Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas; fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat dan fokus seni budaya dan Olahraga
- Permasalahan Pembangunan Daerah  
Perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini
- Urusan Wajib Pemerintah Daerah  
Urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga, diantaranya; masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan

pemuda dan olahraga, masih kurangnya pembinaan kepemudaan dan masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.

▪ Kebijakan Umum Program Pembangunan

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

#### KESIMPULAN

1. Terdapat 278 sarana olahraga yang tersebar di 12 kecamatan yang terbagi dalam 12 jenis cabang olahraga, diantaranya; (1) sarana cabang olahraga renang, (4) sarana cabang olahraga bola basket, (110) sarana cabang olahraga volley, (18) sarana olahraga bulutangkis, (5) sarana cabang olahraga futsal, (1) sarana cabang olahraga panjat dinding, (80) sarana cabang olahraga sepak bola, (54) sarana cabang olahraga sepak takraw, (1) sarana cabang olahraga softball, (2) sarana cabang olahraga tennis lapangan, (1) sarana cabang olahraga tenis meja, dan (1) sarana cabang olahraga atletik sepak bola lainnya (stadion).
2. Menurut kondisi sarana olahraga yang terdapat di Kabupaten Pinrang, terdapat 140 sarana dalam keadaan baik, 123 sarana dalam kondisi kurang baik, dan 15 sarana dalam keadaan rusak
3. Sebagian besar sarana olahraga yang terdapat di Kabupaten Pinrang belum ditunjang oleh prasarana pendukung seperti; jaringan listrik, jaringan air bersih dan prasarana pendukung lainnya.
4. Sebagian besar sarana olahraga status lahannya merupakan milik pemerintah daerah. Namun ada beberapa bangunan sarana olahraga milik pemerintah daerah yang statusnya lahan milik masyarakat

#### REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pemeliharaan bagi sarana yang memiliki kondisi baik, rehab bagi sarana yang memiliki kondisi kurang baik dan perbaikan bagi sarana yang mengalami kerusakan.
2. Perlu pengadaan sarana pendukung seperti jaringan listrik dan jaringan air bersih bagi sarana yang belum memiliki.
3. Perlu dilakukan konfirmasi data status kepemilikan lahan sarana olahraga dengan data aset tanah pemerintah daerah.
4. Perlu dilakukan konsolidasi lahan untuk bangunan sarana olahraga milik pemerintah daerah yang status lahannya milik masyarakat.
5. Perlu dilakukan pengadaan ruang bagi cabang olahraga yang bersifat tradisional di dalam kawasan sarana olahraga.
6. Pembangunan sarana olahraga perlu memperhatikan bentuk tipologi kabupaten, seperti pembangunan sarana olahraga panjat tebing pada daerah dengan kondisi topologi berbukit atau pembangunan sarana olahraga bola volley pantai pada daerah pesisir.

## GRAND DESAIN SISTEM KEARSIPAN KABUPATEN PINRANG

CV, Lestari Global Resource, Tahun 2019

### LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2024 khususnya dalam upaya mendorong Kabupaten Pinrang menjadi pelopor sistem kearsipan digital, maka integrasi semua kearsipan di Kabupaten Pinrang menjadi suatu keharusan yang mendesak dalam mendukung visi e-Government (Good-Governance) di tahun 2024. Integrasi kearsipan di Kabupaten Pinrang diharapkan mampu menyatukan gerak langkah dan program-program untuk mendukung cita-cita bersama dalam memajukan pembangunan secara utuh dan berkelanjutan sesuai visi pembangunan daerah tahun 2024. Integrasi kearsipan hendaknya agar berdampak positif bagi perkembangan bersama. Kabupaten Pinrang juga menyikapi positif perkembangan dunia yang terbuka dan transparansi di mana tidak ada sekat yang membatasi aktifitas manusia di dalam mendapatkan informasi.

Ada tiga hal besar yang menjadi fokus ANRI hingga tahun 2024 yaitu, (i) penyusunan platform norma, standard, prosedur dan criteria serta peraturan perundang-undangan, tentang kearsipan yang mengakomodir arsip digital, (ii) optimalisasi bidang kearsipan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan (iii) pengelolaan arsip secara digital. Arah kebijakan Bidang Kearsipan untuk RPJMN 2020-2024 terdapat dua garis besar. Pertama, arsip sebagai bagian tata kelola pemerintahan dan kedua, arsip sebagai memori keloketif dan jati diri bangsa.

Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan untuk menyusun dokumen grand design tentang pengembangan kearsipan menyeluruh di Kabupaten Pinrang yang mampu berperan secara aktif, profesional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai potensi dan jaringannya yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang hingga tahun 2024, yang dapat mendorong terwujudnya profesionalisme dan berkelanjutan pembangunan di Kabupaten Pinrang.

### PROGRAM STRATEGIS KEARSIPAN

#### 1. Program Strategis Kearsipan Nasional Digital 4.0

Penerapan e-government di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban dan kebutuhan. Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau lebih dikenal dengan e-government harus dilakukan secara progresif dan masif pada pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, e-government juga dibutuhkan untuk penguatan sistem dan jaringan informasi kearsipan. Penerapan e-government di bidang kearsipan ini juga dapat menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pelayanan publik yang lebih cepat, aman dan nyaman.

#### 2. Program Strategis e-Government Kabupaten Pinrang

Pengelolaan e-Government di Kabupaten Pinrang memiliki beberapa kekurangan yang merupakan gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, terutama pada ketersediaan dokumen yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Pinrang.

#### 3. Program Strategis Kearsipan Kabupaten Pinrang

- a. Aspek sumber daya manusia;
- b. Aspek sarana dan prasarana;
- c. Aspek proses kearsipan;
- d. Aspek dukungan kebijakan Pemda;

## RENCANA PROGRAM KEARSIPAN KABUPATEN PINRANG

### 1. Rencana Program Jangka Pendek (Tahun 2019-2020)

Tahap awal dalam program pengembangan kearsipan di Kabupaten Pinrang adalah tahap inisiasi berupa “Standarisasi Sistem Kearsipan”. Pada tahap ini direncanakan program berupa kegiatan jangka pendek yang dapat merubah kondisi kearsipan OPD atau satuan kerja kecamatan dan desa saat ini yang belum memiliki acuan dasar kearsipan menjadi terstandar. Dalam tahap ini diperlukan program penguatan tata kelola arsip mulai dari ketersediaan pengelola, kesiapan kebutuhan sarpras dan standar SOP-nya.

Usulan program dan kegiatan yang tercakup didalamnya pada tahap ini meliputi:

- Program Penguatan Tata Kelola Arsip
- Program Pengadaan Sarana dan Prasarana
- Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kearsipan

### 2. Rencana Program Jangka Menengah (Tahun 2020-2024)

Pada tahap Rencana Program Jangka Menengah 2020-2024, terdapat empat tahapan atau fase seperti berikut :

#### - Tahapan Penguatan Layanan Kearsipan (2020-2021)

Program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang baik melalui penguatan layanan kearsipan, inti kegiatan penguatan layanan kearsipan adalah perbaikan kualitas akses, peningkatan kualitas SDM pengelola arsip, dan kelengkapan arsip dan dokumen, termasuk penyiapan dashboard bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kearsipan.

Program pada tahap ini adalah:

- a. Program perbaikan kualitas akses;
- b. Program peningkatan jumlah dan kapasitas pengelola arsip;
- c. Program penambahan kelengkapan arsip dan dokumen;
- d. Program penyusunan/pemanfaatan aplikasi kearsipan di Kabupaten Pinrang;

#### - Tahap Integrasi Infrastruktur Kearsipan (2021-2022)

Pada tahap ini dilakukan penyatuan atau integrasi sarpras atau infrastruktur kearsipan ke dalam infrastruktur e-Gov. Kegiatan utama dalam tahap ini diarahkan untuk memadukan fasilitas kearsipan di Kabupaten Pinrang agar terkoneksi dengan semua pemangku kepentingan kearsipan dan juga terintegrasi dengan fasilitas e-Gov.

Program dan kegiatan untuk tahap ini adalah:

- a. Program integrasi fasilitas kearsipan dengan fasilitas e-Gov Kabupaten Pinrang;
- b. Program Penguatan Server Kearsipan di Jendela Lasirang;

#### - Tahap layanan arsip terkoneksi (2022-2023)

Program dan kegiatan lanjutan setelah sistem layanan dan infrastruktur sudah tertata dengan baik, diarahkan untuk layanan arsip terkoneksi karena dukungan sistem perangkat lunak dan sarpras (perangkat keras) sudah memadai

Program dan kegiatan untuk tahap ini adalah:

- a. Program penataan jaringan secara terintegrasi di Kabupaten Pinrang;
- b. Program Peningkatan layanan arsip yang terkoneksi dengan JKN;
- c. Program peningkatan kapasitas pengelola kearsipan berbasis digital;

#### - Tahapan Layanan arsip terintegrasi (e-arsip) (2023-2024)

Pada tahap akhir dari grand desain ini, pengembangan kearsipan di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat menyajikan sistem layanan kearsipan secara terintegrasi yang dinyatakan dengan model e-Arsip.

Kegiatan dan program dalam tahap ini meliputi:

- a. Program Penerapan Layanan e-Arsip;
- b. Program penguatan jaringan internet;

## PEMETAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN

Puslitbang Sumberdaya Alam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2020

### LATAR BELAKANG

Kabupaten Pinrang merupakan sentra pertanian terkemuka di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan komoditas andalan adalah padi, jagung, sapi dan unggas komersial ayam pedaging dan petelur. Kabupaten dengan luas  $\pm 1.961,77$  km<sup>2</sup>, secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 108 Kelurahan/Desa. Keberadaan wilayah pesisir sepanjang bagian barat, dan aliran sungai Saddang memberikan dampak dan luasan lahan persawahan teknis, serta keberadaan wilayah dengan vegetasi savana memberi dampak pada perkembangan usaha peternakan. Potensi peternakan terbesar adalah pada komoditi sapi potong, kerbau, kambing, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik.

Potensi peternakan dianalisis dan dipetakan menurut kecamatan, luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan populasi, serta analisis berdasarkan indeks konsentrasi. Secara keseluruhan populasi ternak saat ini adalah 28.697 ekor sapi, 3.884 kerbau, dan 38.693 ekor kambing, dengan pertumbuhan masing-masing 4,12%, 5,55%, dan 5,00%. Populasi keseluruhan ternak ruminansia tersebut setara dengan 32.165 ST. Kecamatan potensial untuk sapi potong adalah Kecamatan Lembang, Mattiro bulu, Suppa dan Duampanua. Potensi ternak kerbau tersebar di kecamatan Lembang dan Mattiro Bulu. Populasi ternak kambing tertinggi di Kecamatan Lembang, Mattiro somepe, Suppa dan Lanrisang. Analisis kepadatan ternak ruminansia menunjukkan bahwa Indeks Konsentrasi Ternak Ruminansia tertinggi di kecamatan Lembang dan Mattiro Bulu, namun kepemilikan atau kepadatan ekonomi tertinggi adalah Kecamatan Batulappa dan Mattiro bulu dengan kepadatan masing-masing 243 ST dan 188 ST setiap 1000 penduduk. Kepadatan wilayah menunjukkan bahwa wilayah paling padat adalah Mattiro Bulu dengan populasi 44 ST/km<sup>2</sup> disusul Kecamatan Lanrisang dan Patampanua masing-masing 21 dan 20 ST/km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah paling rendah kepadatannya adalah Watang Sawitto dengan 5

ST/km<sup>2</sup>. Berdasarkan kepadatan lahan penggembalaan, wilayah paling padat adalah Kecamatan Mattiro somepe dan Lanrisang, yang umumnya memanfaatkan pematang persawasan, kecamatan dengan basis penggembalaan adalah Mattiro Bulu, Lembang, Suppa dan Patampanua, masing-masing dengan kepadatan 1,81 ST/Ha, 0,15 ST/ha, 1,27 ST/ha dan

1,41 ST/ha. Berdasarkan kepadatan usaha tani, maka kecamatan paling potensial adalah Mattiro Somepe, Lanrisang, Mattiro bulu, Patampanua, Watang Sawitto, Cempa, Duampanua, dan Batulappa dengan kepadatan <0,2 ST/ha.

Potensi lahan pengembangan diperoleh dari hasil analisis citra, ditemukan bahwa masih terdapat sekitar 87.000 ha lahan untuk pengembangan ruminansia, 6.517 ha diantaranya adalah savana, 8.147 ha lahan semak belukar, dan 72.961 areal pertanian lahan kering bercampur semak. Potensi terbesar di Kecamatan Lembang, Mattirobulu, Duampanua, Batulappa serta Suppa. Hasil analisis daya tampung menunjukkan bahwa lahan penggembalaan dapat menampung 66.363 ST ternak ruminansia, diatas kondisi saat ini sebesar 32.165 ST. Hasil analisis produksi jerami limbah pertanian untuk pakan ternak ruminansia menunjukkan nilai daya tampung sebesar 220.453 ekor, tersebar di semua kecamatan.

ST, dan 3.310 ST. Sementara kecamatan lain harus memanfaatkan limbah pertanian untuk peningkatan populasi. Kecamatan dengan KPPTTR terbesar adalah Kecamatan Lembang (KPPTTR 48.311 ST), Duampanua (36.252 ST), Patampanua, (25.100 ST), Matri bulu (22.587 ST), dan Cempa (22.094 ST).

Potensi ternak unggas sangat potensial untuk ayam pedaging dan petelur karena berada pada kawasan usaha unggas komersial provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan dengan potensi unggas komersial tertinggi di kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Mattiro Bulu, dengan kawasan utama di desa Malimpung, Sipatuo, dan Manarang. Kawasan lain adalah Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Suppa. Wilayah potensial untuk peternakan ayam buras dan itik meliputi seluruh kecamatan namun populasi tinggi ayam buras terdapat di Kecamatan Lembang, Mattiro Bulu, Patampanua, dan Duampanua. Sementara sebaran populasi ternak itik potensial di Kecamatan Lembang, Duampanua, Mattiro Bulu, dan Paleteang.

Hasil evaluasi faktor internal dan eksternal, menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan Kabupaten Pinrang berada pada kuadran 1 (0,417 ; 0,478), dimana posisi ini menandakan bahwa harus dilakukan strategi agresif, mengandalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Rekomendasi strategi pengembangan Kawasan usaha peternakan Kabupaten Pinrang sesuai hasil analisis faktor internal dan eksternal dirumuskan sebagai berikut : 1) Pengembangan infrastruktur lahan penggembalaan melalui perbaikan tanaman pakan, pagar dan manajemen penggembalaan, serta pemanfaatan jerami limbah pertanian untuk mencukupi kekurangan hijauan di musim kemarau; 2) Pengembangan sentra komoditi dalam bentuk Desa Budidaya, Desa Penggemukan, Desa IB, melalui perbaikan sistem budidaya ternak dengan tata kelola pakan, recording, seleksi dan perbaikan sistem perkawinan ternak; 3) Penanganan penyakit reproduksi (Brucellosis) dan penyakit hewan menular strategis lainnya; 4) Pembinaan petani melalui sistem pendampingan yang terstruktur dan melembaga melalui kelompok tani; 5) Pengembangan unggas komersial dan non komersial model korporasi tani; dan 6) Penataan rantai pasar dan pengembangan sistem pemasaran, mengikuti trend teknologi. Adapun lokasi pengembangan adalah: 1) Kecamatan Mattiro bulu, meliputi desa Alitta dan Makkawaru, serta desa Pananrang; 2) Kecamatan Suppa di desa Tellumpanua; 3) Kecamatan Lembang, desa Pakeng, Rajang dan Letta; 4) Kecamatan Patampanua pada desa Sipatuo, Malimpung, dan Padangloang; dan 5) Kecamatan Batulappa: Batulappa, Kaseralau dan Watang Kassa. Kegiatan pengembangan akan dimulai tahun 2021 dengan persiapan yang meliputi detail analisis situasi, dilanjutkan dengan pengembangan selama tahun 2022 s/d 2024 dengan dampak mulai diperoleh pada tahun 2025. Kebutuhan anggaran mencapai Rp. 199.730.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pinrang, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN

## KESIMPULAN

Program Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan Kabupaten Pinrang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat upaya pencapaian swasembada daging sapi daerah/nasional, melalui peningkatan populasi ternak dan kemampuan produksi daging. Potensi peternakan Kabupaten Pinrang terdiri atas potensi ternak, sumberdaya alam dan sumber daya manusia, antara lain sebagai berikut:

- Potensi ternak ruminansia yang terdiri atas sapi, kerbau dan kambing, serta potensi ternak unggas yang terdiri atas ternak ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik
- Potensi ternak ruminansia unggulan tersebar di 5 kecamatan yakni kecamatan Mattiro bulu, Suppa, Lembang, Patampanua dan Batulappa, sedangkan ayam ras komersial terutama di Kecamatan Patampanua, Mattiro bulu, Suppa dan Tiroang, unggas non komersial di kecamatan Mattiro bulu, Duampanua, Lembang dan Suppa.
- Potensi sumber daya pakan sangat besar, bersumber dari padang penggembalaan, areal pertanian lahan kering dan limbah tanaman pangan. Daya tampung pakan ternak melebihi potensi ternak yang ada sehingga sangat memungkinkan

peningkatan populasi ternak ruminansia. Peningkatan populasi unggas komersial dan non komersial juga memungkinkan tetapi harus didukung dengan kemampuan pemasaran yang lebih baik.

#### REKOMENDASI

Pengembangan Kawasan Peternakan di Kabupaten Pinrang dilaksanakan dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Arah pengembangan usaha peternakan ruminansia adalah pengembangan padang penggembalaan rakyat dikombinasikan dengan pemanfaatan limbah pertanian secara massif, sehingga kebutuhan pakan musim kemarau dapat terpenuhi dengan biaya lebih murah;
- b. Pengembangan usaha ternak dilaksanakan dengan memilih pusat-pusat pertumbuhan dengan mempertimbangkan potensi dan daya dukung lingkungan serta faktor SDM, dengan membentuk Desa/Kampung Ternak: Desa Perbibitan Sapi, Desa IB, Desa Penggemukan, Desa Ayam Buras, Desa Itik dll. Sementara sentra peternakan unggas komersial dibuat lebih luas dengan sentra basis kecamatan dan wilayah pembinaan perusahaan swasta;
- c. Berdasarkan analisis kebutuhan anggaran, diharapkan pembiayaan dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder. Pembiayaan besar pada pengembangan ternak sapi, dan pencegahan penyakit diharapkan bersumber dari APBN.

## MASTERPLAN PENGEMBANGAN BALAI BENIH IKAN (BBI)

PT. Rancang Rencana Indonesia, Tahun 2020

Budidaya ikan berpeluang besar menjadi tumpuan bagi sumber pangan hewani di masa depan. BBI adalah salah satu sarana milik pemerintah yang memiliki fungsi untuk menyediakan benih ikan baik itu ikan konsumsi atau ikan hias yang dibutuhkan oleh para petani ikan pembesaran. BBI juga memiliki peran yang sangat penting untuk menyediakan benih ikan yang memiliki kualitas yang bagus dan sangat berkontribusi untuk pembangunan daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah dari hasil penjualan benih ikan kepada petani. Guna meyakinkan petani ikan terhadap mutu dan kualitas benih ikan yang dimiliki BBI. Maka BBI harus memiliki penjamin mutu.

Tujuan kegiatan penjamin mutu dapat bermanfaat, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal organisasi. Tujuan penjamin (assurance) terhadap mutu tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.
2. Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang, fasilitas, maupun bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya.
3. Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai dengan sasaran dan waktu secara konsisten. Bila memungkinkan, dapat membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.
4. Menjamin akan adanya hal – hal yang tidak dikehendaki.

Balai Benih Ikan (BBI) air tawar Malimpung Kabupaten Pinrang merupakan unit balai yang didirikan sebagai alternatif dalam usaha pengembangan sumber daya alam, khususnya di bidang perikanan guna mencukupi kebutuhan benih ikan air tawar yang berkualitas, baik untuk kegiatan budidaya maupun restocking di perairan umum. BBI Malimpung Kabupaten Pinrang memiliki keadaan topografi dimana wilayah yang landai sekitar 6-9° hal ini termasuk menguntungkan karena berdekatan dengan saluran Irigasi Primer yang memudahkan dalam proses pengadaan air. Sedangkan jenis tanahnya liat berpasir dengan pH 6,5 – 7 (netral). Sumber air diperoleh dari pegunungan dengan debit air 10-12 L/menit.

Merancang kembali Master plan Pengembangan Balai Benih Ikan Kabupaten Pinrang berdasarkan kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan saat ini dan masa mendatang, dengan memperhatikan permasalahan dan potensi pada area perencanaan, dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam Master plan Pengembangan Balai Benih Ikan Kabupaten Pinrang ini adalah :

1. Melaksanakan kajian potensi lahan pembangunan melalui kegiatan investigasi dan survei teknik detail pada lokasi yang telah ditetapkan.
2. Memperoleh arahan teknik dan pembiayaan pembangunan Balai Benih Ikan Kabupaten Pinrang berdasarkan kebutuhan pokok dan fungsi kelembagaan Balai Benih Ikan serta berdasarkan pentahapan prioritas pembangunan.

BBI adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan induk dan benih ikan yang bermutu baik dalam jumlah yang memadai dan juga merupakan sarana untuk pengujian lapangan terhadap teknologi yang dihasilkan oleh Balai Budidaya Air Tawar. Karena itu BBI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penghasil induk unggul dalam rangka menunjang Usaha Perbenihan Rakyat (UPR) dan pengendalian mutu benih;
2. Penghasil benih untuk keperluan penebaran di perairan umum dan bila perlu
3. untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh rakyat;
4. Tempat melaksanakan adaptasi teknik pembenihan yang lebih baik;
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan Lembaga Sertifikasi Produk.

## KESIMPULAN

Mengoptimalkan efisiensi pemanfaatan prasarana jalan dengan jenis arus pergerakan yang terjadi. Mendapatkan distribusi atau penyebaran pergerakan yang selaras dengan jenis aktivitas yang diwadahi sehingga dicapai ketertiban. Mencapai kinerja fungsi serta keseimbangan, kaitan, keterpaduan dari berbagai elemen pergerakan, lingkungan dan sosial, antara kawasan perencanaan dan lahan di luarnya.

### 1. Komponen Penataan

- a. Sistem jaringan jalan dan pergerakan, yaitu rancangan sistem pergerakan yang terkait, antara jenis-jenis jalan yang tersebar dalam kawasan perencanaan dan jenis pergerakan yang melaluinya, baik masuk dan keluar kawasan.
- b. Sistem sirkulasi kendaraan umum, yaitu rancangan sistem arus pergerakan kendaraan umum formal, yang dipetakan pada hirarki jalan yang ada dalam kawasan perencanaan.
- c. Sistem sirkulasi kendaraan pribadi, yaitu rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki jalan dalam kawasan perencanaan.
- d. Sistem parkir, yaitu rancangan sistem gerakan arus masuk dan keluar kawasan untuk parkir kendaraan di dalam internal kawasan.
- e. Sistem perencanaan jalur servis/pelayanan lingkungan, yaitu rancangan sistem arus pergerakan dari kendaraan servis (seperti pengangkut sampah, pengangkut barang, dan kendaraan pemadam kebakaran) dalam kawasan, yang dipetakan pada hirarki jalan yang ada dalam kawasan perencanaan.
- f. Sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda, yaitu rancangan sistem arus pejalan kaki (termasuk penyandang cacat dan lanjut usia) dan pemakai sepeda, yang khusus disediakan dalam kawasan perencanaan.
- g. Sistem jaringan jalur penghubung terpadu (pedestrian linkage), yaitu rancangan sistem jaringan berbagai jalur penghubung yang memungkinkan menembus beberapa bangunan atau pun beberapa kaveling tertentu dan dimanfaatkan bagi kepentingan jalur publik. Jalur penghubung terpadu ini dibutuhkan terutama pada daerah dengan intensitas kegiatan tinggi dan beragam. Jalur penghubung terpadu harus dapat memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pejalan kaki.

### 2. Prinsip-prinsip Penataan

Prinsip-prinsip penataan Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung:

#### a. Secara Fungsional, meliputi :

##### (1) Kejelasan sistem sirkulasi

Perencanaan sistem sirkulasi yang jelas dan mudah dipahami tentang sistem kaitan antara jejaring jalur-jalur utama jalur sekunder, dan jalur lokal sesuai hirarki jalan

##### (2). Mobilitas publik

- Peningkatan kaitan antarsistem sirkulasi pada kawasan perencanaan dengan sistem sirkulasi kawasan sekitar;
- Penciptaan sistem sirkulasi yang mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik termasuk penyandang cacat dan lanjut usia (difabel), sehingga memperkaya karakter dan integrasi sosial para pemakainya;
- Peningkatan kaitan dan pemisahan yang jelas diantara berbagai moda sirkulasi (pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan pribadi, maupun kendaraan servis);
- Peningkatan sistem penghubung yang lebih berorientasi pada pejalan kaki.

##### (3). Aksesibilitas kawasan

- Perencanaan kawasan yang mengintegrasikan sirkulasi eksternal dan internal dari/ke/di dalam kawasan/blok atau subblok;
- Penciptaan kawasan yang mewadahi kebutuhan semua orang termasuk masyarakat difabel.

b. Secara Fisik, meliputi penataan :

(1). Dimensi sirkulasi dan standar aksesibilitas

Perencanaan teknis aksesibilitas lingkungan merujuk pada Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

(2). Estetika, citra dan karakter kawasan, melalui:

- Perencanaan sistem sirkulasi yang mencerminkan karakter khas setempat;
- Perencanaan sistem sirkulasi secara simultan dengan pengaturan kendaraan sebagai optimalisasi pemanfaatan karakter pergerakan setempat dengan jenis moda transportasi yang beragam.

(3). Kualitas fisik

- Penetapan desain yang memenuhi kenyamanan pemakai dengan mempertimbangkan iklim/cuaca setempat;
- Penetapan desain yang mengutamakan keselamatan pejalan kaki dengan pengolahan elemen pembatas dan pengaman pejalan kaki (seperti bollards) dan elemen peneduh yang memberi kenyamanan.

(4). Kelengkapan fasilitas penunjang lingkungan

Penyediaan elemen pendukung kegiatan seperti perabot jalan berupa lampu, dan pemilihan material perkerasan, dan lain-lain.

c. Secara Lingkungan, meliputi penataan :

(1). Peningkatan nilai kawasan

- Peningkatan nilai tanah dan kemampuan lahan melalui perbaikan tingkat pencapaian ke dalam dan di dalam kawasan;
- Peningkatan hubungan fungsional antar berbagai jenis peruntukan dalam kawasan;
- Peningkatan modifikasi desain/pengembangan yang sesuai karakter setempat.

(2). Integrasi blok kawasan dan sarana pendukung

- Pengintegrasian sistem penghubung antar-beberapa lahan kecil yang terjadi dari pembagian subblok eksisting;
- Integrasi sarana parkir dari beberapa blok yang berdekatan;
- Peningkatan keterpaduan sistem pergerakan dan penghubung dengan sarana parkir;
- Peningkatan kemungkinan desain jalur penghubung yang menembus bangunan antar kaveling terutama pada daerah dengan intensitas kegiatan tinggi dan beragam atau area fungsi campuran.

(3). Kelestarian ekologis kawasan

- Pengembangan tata hijau yang mengantisipasi polusi motorisasi;
- Pengembangan jalur non mesin;
- Pengembangan jalur yang berorientasi pada pejalan kaki.

## SURVEY KEBIJAKAN PUBLIK KABUPATEN PINRANG

Celebes Research Center, Tahun 2020

### LATAR BELAKANG

Salah satu kewajiban utama pemerintah adalah membuat kebijakan, melaksanakan program dan menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, bermutu dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak publik. Dalam perspektif ini, publik tidak lagi menjadi objek semata, lebih dari itu mereka adalah "end user" dari produk kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Jika pemerintah bekerja dengan baik, terinformasi ke publik dengan baik, maka persepsi mereka juga akan baik. Jika persepsi publik tentang kinerja pemerintahnya baik, dukungan dan partisipasi mereka untuk lebih menyukseskan program-program pemerintah pasti akan lebih meningkat. Sebaliknya, jika persepsi publik terhadap kinerja pemerintah buruk, tak sedikit contoh ekstrim terjadinya public disobedience (pembangkangan publik) terhadap pemimpin/pemerintahnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk responsif terhadap aspirasi publik. Dukungan yang diberikan masyarakat pada pemilihan umum bukan hanya merupakan ritual untuk menghasilkan kepala daerah, tapi merupakan kontrak jangka panjang selama masa jabatan, paling tidak atas janji dan program kerja yang disampaikan ketika kampanye. Sehingga semakin dekat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat maka kepuasan atas kinerja pemerintah menjadi semakin positif, artinya legitimasi yang berjalan akan semakin tinggi

### TUJUAN

1. Mengetahui opini publik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pinrang pada berbagai masalah sosial kemasyarakatan;
2. Melakukan pengukuran terhadap indeks kinerja pemerintah Kabupaten Pinrang pada berbagai bidang pemerintah (seperti: bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, pekerjaan umum, dll);
3. Melakukan pengukuran terhadap indeks harapan publik pada berbagai bidang pemerintah; serta melihat gap (kesenjangan) antara harapan publik dengan kinerja pemerintah.

### ASPEK YANG DIUKUR

1. Aspek pelaksanaan pemerintahan, kondisi keamanan, ekonomi, pelayanan instansi pemerintah, akses masyarakat terhadap barang dan jasa.
2. Pengukuran persepsi publik terhadap kinerja pemerintah kecamatan dan kelurahan
3. Pengukuran persepsi publik terhadap 31 bidang pemerintahan di Kabupaten Pinrang, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perencanaan pembangunan daerah, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga, kesbangpol, satuan polisi pamong praja dan damkar, keuangan dan asset daerah, kepegawaian daerah dan pengembangan SDM, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan kearsipan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, perikanan, pengelolaan sumber daya air, penelitian dan pengembangan, penanggulangan bencana daerah, komunikasi dan informatika, bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## KESIMPULAN

Dari metode sampling yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan:

1. Persepsi publik terhadap kondisi aktual Kabupaten Pinrang dari aspek pemerintahan, keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan aspek politik yang telah dilakukan, responden menjawab dan diperoleh hasil sangat baik;
2. Persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang telah dilakukan kepada responden maka diperoleh hasil cukup puas atas pelayanan yang diberikan;
3. Kinerja dan harapan publik pada bidang pemerintahan, dengan indeks kinerja dengan skor antara 1-4, maka diperoleh nilai 2,80 (Baik);
4. Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang, maka diperoleh hasil dari responden menjawab cukup puas.

## MASTER PLAN RSUD MADISING KABUPATEN PINRANG

CV. Karaeng Panritaiya, Tahun 2020

### PENDAHULUAN

Master Plan merupakan dasar rencana pengembangan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, Master Plan mempunyai peranan sebagai acuan bagi pengembangan di unit-unit atau instalasi-instalasi. Tidak adanya rencana induk pengembangan fisik (physical master plan) yang memuat arahan pengembangan program fisik secara jelas menyebabkan banyaknya permasalahan yang timbul pada sebuah fasilitas kesehatan, baik lahan, aset fisik, maupun sumber daya yang tidak teralokasikan secara efektif dan efisien.

Ada 3 pendekatan dalam manajemen fisik yang diterapkan dalam berbagai permasalahan pengembangan fasilitas fisik rumah sakit:

1. Pendekatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum ada atau belum beroperasi.
2. Pendekatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah beroperasi dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut
3. Pendekatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menemui berbagai masalah fisik seperti kepadatan bangunan tinggi, potensi pengembangan lahan minim, tumpang tindih fungsi, namun disisi lain ada kebutuhan pasar terhadap pengembangan pelayanan.

### PROFIL RSUD MADISING

Pertengahan tahun 2016 tepatnya pada Bulan Agustus Rumah Sakit Pratama Bungi dibangun di atas lahan ± 2200 m<sup>2</sup>. Pada awal tahun 2017 Pengembangan Rumah Sakit Umum Pratama Bungi telah rampung dengan ciri khas bangunan yang minimalis memberikan keunikan tersendiri. Pada tanggal 09 Oktober Tahun 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Madising mulai dioperasikan dan berselang sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 November 2017 barulah rumah sakit ini diresmikan oleh Bapak Bupati Pinrang (H.A.Aslam Patonangi, SH.M.Si) dan didampingi Bapak Wakil Bupati Pinrang (Ir. Darwis Bastama).

Rumah Sakit Pratama Bungi dalam pengelolaan dan pengembangannya sangat dirasakan perlunya menjalin kerjasama dengan semua pihak, baik masyarakat, swasta dan terutama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Rumah Sakit Pratama Bungi Kabupaten Pinrang adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dan pada tanggal 17 Februari 2019 berubah nama dan diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Kelas D, sesuai dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, dengan berlakunya keputusan ini, maka status Rumah Sakit Pratama Bungi berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Madising Pinrang.

### ANALISA KECENDERUNGAN EKSTERNAL

Analisa kondisi eksternal RSUD Madising Kabupaten Pinrang akan ditentukan terlebih dahulu variable eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kecenderungan faktor eksternal untuk masa mendatang dengan menetapkan lebih dahulu faktor-faktor eksternal yang terkait dengan perkembangan RSUD Madising Kabupaten Pinrang, adapun variabel tersebut adalah: kebijakan, geografi, demografi, kondisi sosial ekonomi, derajat kesehatan dan sarana ketenagakerjaan kesehatan.

### ANALISA KECENDERUNGAN INTERNAL

Analisa kondisi internal RSUD Madising Kabupaten Pinrang akan ditentukan terlebih dahulu variabel internal, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kecenderungan faktor internal untuk masa mendatang dengan menetapkan terlebih

dahulu faktor-faktor internal terkait dengan perkembangan RSUD Madising Kabupaten Pinrang dalam rangka pengembangan kedepan dengan menetapkan variabelP variabelnya yaitu: kondisi rumah sakit, jenis layanan, kinerja pelayanan, SDM dan organisasi.

#### MASTER PROGRAM DAN PROGRAM FUNGSI

1. Kebutuhan Fasilitas RSUD Madising Kabupaten Pinrang
  - Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit;
  - Kebutuhan Peralatan RSUD Madising Kabupaten Pinrang;
  - Kebutuhan Fasilitas Perparkiran.
2. Kebutuhan Sumberdaya Manusia RSUD Madising Kabupaten Pinrang  
Rencana pengadaan SDM berupa rekrut SDM dilakukan secara bertahap dengan cara menseleksi langsung dari pihak manajemen rumah sakit maupun dapat dilakukan kerjasama dengan pihak institusi sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan kompetensinya.
3. Aktivitas Kerja RSUD Madising Kabupaten Pinrang
  - Pola Sirkulasi Unit Gawat Darurat;
  - Pola Sirkulasi Ruang Perawatan;
  - Pola Sirkulasi Rawat Jalan;
  - Pola Sirkulasi Instalasi Bedah Central;
  - Pola Sirkulasi Instalasi Farmasi;
  - Pola Sirkulasi Ruang Sterilisasi;
  - Pola Sirkulasi Instalasi Radiologi;
  - Pola Sirkulasi Instalasi Laboratorium;
  - Pola Sirkulasi Dapur/Instalasi Gizi;
  - Pola Sirkulasi Ruang Cuci;
  - Pola Sirkulasi Instalasi Bengkel (Workshop);
  - Sirkulasi Kendaraan Pasien, Pengunjung/Petugas, Service;
  - Sirkulasi Pejalan Kaki.
4. Kebutuhan Ruang RSUD Madising Kabupaten Pinrang
5. Konsep Master Plan Pengembangan RSUD Madising Pinrang
  - Berbasis Hospital by Law;
  - Pelayanan Jasa Kedokteran Klinik;
  - Konsep Tapak/Site;
  - Konsep Teknis Struktur dan Arsitektur.

#### RENCANA KONSEP UTILITAS

Kebutuhan pelayanan jaringan utilitas bagi Kawasan Rumah Sakit merupakan suatu keharusan, karena keberadaannya akan sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan Rumah Sakit. Kebutuhan jaringan utilitas di kawasan Rumah Sakit, meliputi: air bersih, telepon/komunikasi, listrik, saluran drainase, saluran pembuangan air kotor dan limbah, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.

#### MASTER PLAN DAN RENCANA PENTAHAPAN

1. Rencana Pentahapan dan Penyediaan Fisik Rumah Sakit;  
Penyediaan bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Rumah Sakit, serta Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan lainnya dari Rumah Sakit tersebut. Rumusan perencanaan fisik bangunan akan diwujudkan kedalam rencana blok bangunan/massa bangunan (blok plan) kawasan rumah sakit dan penunjangnya. Rumah sakit yang ada saat ini akan dilakukan pengembangan dan optimalisasi pada bangunan yang ada.

2. Rencana Pentahapan Penyediaan Sumber Daya Manusia/SDM Rumah Sakit; Rancangan SDM RSUD Madising Kabupaten Pinrang mengacu pada standard Kemenkes 56 Tahun 2014 dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan RSUD Madising Kabupaten Pinrang.
3. Rencana Pentahapan Penyediaan Pembiayaan Pembangunan Rumah Sakit; Pengembangan dan optimalisasi RSUD Madising Kabupaten Pinrang meliputi empat tahapan yaitu tahap pra proyek, tahap pembangunan, tahap pra operasional, dan tahap operasional
4. Rencana Pentahapan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; Peralatan disusun berdasarkan kebutuhan dari masing-masing unit/bagian layanan baik yang akan diadakan sendiri maupun yang akan dilakukan pengadaannya dalam bentuk kerja sama dengan pihak luar.
5. Masterplan Pengembangan dan Optimalisasi RSUD Madising Kabupaten Pinrang;
  - Merencanakan dan melaksanakan penataan ruang luar bangunan di kawasan dari segi pertamanan dan penyediaan halaman parkir serta penataan akses keluar masuk rumah sakit sesuai fungsinya.
  - Merencanakan dan melaksanakan tata letak ruang bangunan lama yang sudah ada dari aspek pemenuhan kebutuhan fungsi, zoning dan alur proses kegiatan.
  - Merencanakan pemanfaatan lahan perluasan kawasan rumah sakit sesuai dengan rencana dan strategi operasional jangka panjang rumah sakit untuk pengembangan layanan yang akan dilakukan, untuk itu diusulkan perlu dilakukan rencana bisnis Rumah Sakit.

**FEASIBILITY STUDY PENENTUAN JENIS PERKERASAN JALAN  
KECAMATAN LEMBANG DAN KECAMATAN BATULAPPA**

Pusat Unggulan Center of Technology (COT) Fakultas teknik Universitas  
Hasanuddin, Tahun 2020

**LATAR BELAKANG**

Sebagai salah satu upaya memenuhi Visi Misi Bupati Pinrang Periode 2019-2024 terkait pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah Kab. Pinrang bagian Utara.

**TUJUAN**

- a. Pemenuhan Dokumen Perencanaan jalan kabupaten terkait penentuan jenis perkerasan jalan di wilayah Kec. Lembang dan Kec. Batulappa;
- b. Dokumen perencanaan jalan yang dapat digunakan untuk dokumen perencanaan ke depan khususnya terkait pemenuhan data teknis dalam penginputan usulan DAK fisik bidang jalan dan/atau dari Kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (KPBU);
- c. Bahan usulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan terkait pinjam pakai pembangunan/peningkatan jalan terhadap ruas jalan yang masuk Kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

**REKOMENDASI**

- a. Perubahan konstruksi dari kerikil/tanah ke beton sebagaimana saat ini harus dilakukan di jalan ruas Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang perlu didukung mengingat dalam banyak hal konstruksi beton lebih layak dibanding konstruksi aspal.
- b. Perlu dilakukan studi lebih berkaitan dengan desain perawatan perkerasan, karena ini sangat berpengaruh dikarenakan masing-masing lokasi berbeda cara penanganannya.
- c. Untuk ruas jalan yang lebarnya tidak cukup 3 meter sebaiknya disarankan untuk menjadi jalan desa.

## RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINAPOLITAN LUWITA TAHUN 2020 - 2024

Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya (LP2S) Universitas Muslim  
Indonesia Tahun 2020

### LATAR BELAKANG

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa arah pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata Kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang terfokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan wisata desa dan produk unggulan desa dan Kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penetapan Kawasan Pedesaan dan RPKP dilakukan oleh Bupati/walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk sarana dan prasarana yang mendukung usulan Pemerintah desa maupun rencana dan program pembangunan Kabupaten/kota/desa.

### SASARAN

- a. Teridentifikasinya dan terinventarisasinya data dan informasi terkait yang diperlukan bagi kegiatan revisi Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan LUWITA;
- b. Terlaksananya kegiatan analisis kebijakan terkait, kondisi existing dan permasalahan serta isu strategis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan revisi dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan LUWITA;
- c. Tersusunnya dokumen revisi final sesuai dengan ketentuan peraturan yang terkait dalam penyusunan RPKP.

### REKOMENDASI

- a. Pemilihan Pusat Tumbuh Baru Pada Kawasan Minapolitan LUWITA;
- b. Sinergitas Kelembagaan;
- c. Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Kawasan Minapolitan LUWITA.

## GRAND DESAIN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 - 2035

Kerjasama Bappelitbangda kab. Pinrang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Puslitbang Sumberdaya Alam Universitas Hasanuddin, Tahun 2021

Tujuan utama pembangunan kependudukan Kabupaten Pinrang adalah menciptakan kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Hal ini dilakukan melalui pencapaian tujuan sebagai berikut: a) mewujudkan tercapainya tahap windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk; b) mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman, bertakwa, berahlak mulia, mandiri dan memiliki etos kerja yang tinggi; c) mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi; dan d) mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Dalam 10 tahun sejak sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang telah mengalami peningkatan sebesar 14,7 persen dari angka 352 ribu jiwa menjadi 403 ribu jiwa lebih pada Tahun 2020. Walaupun jumlah penduduk nampak tumbuh secara linier dan terus meningkat dari tahun-ketahun, namun pada sisi pertumbuhan penduduk Pinrang terlihat bertumbuh secara sangat dinamis dan berfluktuasi. Antara periode 2015- 2020, laju pertumbuhan tahunan tertinggi terjadi pada Tahun 2020, mencapai 1,37 persen pertahun, sementara pada Tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,63. Dalam dua tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami peningkatan pada kisaran angka 0,95 hingga 1,37 persen pertahun.

IPM Pinrang selama periode 2014-2015 relatif lebih baik dibandingkan dengan keadaan di tingkat provinsi, namun pada tahun 2016 terlihat capaian IPM Pinrang lebih rendah dibandingkan kondisi provinsi pada umumnya. Pada Tahun 2014 IPM Pinrang sebesar 68,92 lebih tinggi dibandingkan keadaan provinsi sebesar 68,49; sementara perkembangan selanjutnya, yaitu pada Tahun 2016 hingga pada Tahun 2020, terlihat capaian IPM Kabupaten Pinrang selalu lebih rendah dibandingkan keadaan di provinsi pada umumnya. Adapun perkembangan untuk tahun 2019-2020 laju perkembangan IPM Pinrang sebesar 0,20 persen sebesar 71,26 lebih baik dibandingkan keadaan ditahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan dengan keadaan provinsi sebesar 71,93 dengan laju perkembangan sebesar 0,38 persen.

Estimasi jumlah penduduk Pinrang di tahun 2035 adalah sebanyak 440.986 jiwa yang terdiri atas 216.379 jiwa penduduk laki-laki dan 224.607 penduduk perempuan. Perkembangan jumlah penduduk antara tahun 2010-2015 peningkatan jumlah penduduk laki-laki sebesar 4,45 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,85 persen setiap tahunnya; sedangkan pada penduduk perempuan terjadi kenaikan yang lebih kecil, yaitu sebesar 3,97 persen, dengan rata-rata pertumbuhan 0,78 persen. Estimasi perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang

antara tahun 2015 – 2020 diperkirakan sebesar 3,48 persen (hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 = 10,14%) dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 0,674 persen per tahun. Penduduk laki-laki diperkirakan akan bertambah hingga sebanyak 184.203 jiwa dan perempuan sebanyak 195.199 jiwa, menghasilkan total 403.994 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk laki-laki dalam kurun waktu tersebut sebesar 0,696 persen pertahun, sedangkan penduduk perempuan sebesar 0,653 persen pertahun. Untuk kurun waktu 2020 – 2025 diperkirakan terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 2,825 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,565 persen pertahun. Peningkatan jumlah penduduk laki-laki sebesar 3,17 persen dengan rata-rata tahunan sebesar 0,634 persen pertahun, dan penduduk perempuan sebesar 2,83 persen dengan rata-rata 0,50 persen pertahun. Pada tahun 2030 total jumlah penduduk diperkirakan sebesar 429.230 jiwa, terdiri atas 209.925 jiwa penduduk laki-laki; dan 219.304 jiwa perempuan; dan pada tahun 2035 total penduduk sebesar 440.986 jiwa, terdiri atas 216.379 jiwa penduduk laki-laki; dan 224.607 jiwa penduduk perempuan. Dihitung sejak Tahun 2010, total jumlah penduduk Pinrang akan mengalmi peningkatan sebanyak 25,21 persen atau bertambah 88.801 jiwa; estimasi perkembangan penduduk laki-laki sebesar 26,90 persen; dan perempuan sebesar 23,63 persen; total laju pertumbuhan tahunan penduduk laki-laki sebesar 0,76 persen pertahun; sedangkan penduduk perempuan sebesar 0,71 persen pertahun; dan total penduduk sebesar 0,73 persen pertahun.

Rasio ketergantungan juga biasa disebut dengan rasio beban tanggung atau Dependency Ratio merupakan perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif (usia <15 dan >64 tahun) dengan penduduk berusia produktif (15 - 64 tahun). Semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin sedikit jumlah penduduk usia non-produktif dibandingkan penduduk berusia produktif. Rasio beban tanggung diatas merupakan tolak ukur terjadinya kondisi demographic dividend atau biasa diistilahkan bonus demografi. Indikasi dari bonus demografi adalah saat dimana rasio ketergantungan penduduk disuatu daerah sama dengan atau lebih rendah dari 50%. Secara teori, kondisi ini dianggap sebagai keuntungan ekonomis, karena proporsi penduduk usia produktif yang tinggi berpotensi menjadi sumber tenaga kerja sedangkan disaat yang sama semakin sedikit jumlah penduduk yang harus mereka tanggung.

## RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PINRANG

Kerjasama Bappelitbangda kab. Pinrang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Puslitbang Sumberdaya Alam Universitas Hasanuddin Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) memberikan arahan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN), penataan ruang kawasan Strategis Propinsi, dan penataan ruang Strategis Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana kawasannya diamanatkan oleh PP Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, perlu suatu proses perencanaan secara baik dan benar serta implementasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang disepakati oleh semua pengambil keputusan baik di pusat maupun daerah.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan sebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi transmigrasi secara terpadu.

Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari ; (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, dan (2) rengahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa. Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini yaitu menyusun dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sebagai acuan bagi kegiatan selanjutnya yaitu perwujudan kawasan transmigrasi. Sementara tujuan dari penyusunan dokumen ini yaitu untuk mewujudkan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang terintegrasi dalam rencana tata ruang kawasan perdesaan, mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang diantaranya :

1. terwujudnya permukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria Clear and Clean (CnC). Permukiman yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang (3L). Selain itu mampu memberikan tempat tinggal, aset dan kesempatan berusaha para transmigran dan masyarakat sekitar, sekaligus menjamin kepastian hak-hak kepemilikan tanah secara ilegal dan berkelanjutan.
2. Terbinanya para transmigran dengan kompetensi dan kualitas yang sesuai kebutuhan pengembangan permukiman dalam kawasan transmigrasi.

3. Pembinaan dan pengembangan kapasitas pengetahuan masyarakat kawasan transmigrasi yang sesuai dengan potensi, bio fisik lokasi permukiman dan kondisi sosial di kawasan transmigrasi.
4. Tercipta dan berkembangnya produk unggulan dari komoditas pertanian khususnya tanaman perkebunan (Kakao dan Kopi) dan tanaman pangan seperti padi dan jagung yang dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan. Selain itu komoditas peternakan dapat tumbuh dan berkembang khususnya sapi, kambing dan ayam.
5. Pemberian sarana dan input produksi yang tepat sasaran dan pendampingan yang intens serta keberlanjutan agar tercapai kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi.
6. Terwujudnya unit-unit produksi yang berasal dari berbagai Satuan Permukiman (SP) yang kemudian berkumpul pada Pusat Satuan Kawasan Permukiman (SKP) atau Desa Utama, ataupun KPB yang berperan sebagai pusat jasa distribusi perdagangan ke luar kawasan.
7. Terwujudnya KPB atau Pusat SKP yang berperan sebagai pusat jasa distribusi perdagangan aliran produk dan barang dari luar kawasan untuk kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah dibawahnya (SP-SP).
8. Terbinanya para transmigrasi dengan kompetensi dan kualitas yang sesuai terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang Mengacu Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi Marennu, meliputi:

1. Pembangunan Kawasan Transmigrasi Marennu Dan Pengembangan Kawasan Tertinggal disesuaikan dengan potensi daerah, kondisi wilayah dan terintegrasi dengan kawasan lain maupun pusat pertumbuhan yang sudah ada.
2. Kebijakan penetapan standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendukung.
3. Pengembangan fungsi kawasan untuk peningkatan perekonomian yang berdasarkan komoditas unggulan berbasis lahan yang dikelola sesuai perkembangan IPTEK secara utuh dan terpadu.
4. Pembinaan dan pengembangan kapasitas pengetahuan masyarakat budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten.
5. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan (termasuk RTH Kawasan).
6. Pendekatan sosial budaya dikedepankan guna menjadkan keserasian antara transmigran pendatang dengan penduduk setempat.
7. Kebijakan pengendalian pembangunan Kawasan Transmigrasi Marennu merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah kabupaten sehingga pembangunan transmigrasi harus diletakkan pada kerangka Kabupaten Membangun Daerahnya.

Hasil deliniasi potensi luasan Kawasan Transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang adalah : 20.809 Ha dengan fungsi lahan keseluruhan Areal Penggunaan Lain (APL) dan mengenclave (mengeluarkan dari deliniasi) seluruh kawasan Hutan Lindung. Deliniasi Kawasan Transmigrasi Marennu meliputi 4 Kecamatan yaitu: Sebagian desa di Kecamatan Batulappa (2 Desa), sebagian desa di Kecamatan Duampanua (3 Desa), Sebagian desa di Kecamatan Paleteang (2 Desa) dan Sebagian desa di Kecamatan Lembang (10 Desa) membentuk 1 KPB dan 3 SKP serta 17 SP.

Penempatan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang adalah SP/desa yang dapat menjangkau SKP maupun KPB sebagai pusat pemasaran lokal yang memiliki potensi untuk menjadi permukiman capat berkembang serta terintegrasi dengan konsep pusat-pusat pertumbuhan regional Kabupaten Pinrang.

Dalam kawasan transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang direncanakan pusat pertumbuhan wilayah, yaitu 1 KPB Marennu dan 3 SKP yang merupakan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP). Masing-masing SKP tersebut merupakan pusat pelayanan dari desa-desa diwilayah sekitar yaitu: SKP A dengan Pusat SKP/Desa

Utama di Watang Kassa, SKP B dengan Pusat SKP/Desa Utama Sali-Sali, SKP C dengan Pusat SKP/Desa Utama Basseang. Pusat kawasan transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang adalah Desa Tadokkong yang terletak di posisi tengah kawasan transmigrasi Marennu.

Rencana pola kawasan transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang, terbagi atas rencana luasan kawasan transmigrasi, rencana pemanfaatan ruang kawasan transmigrasi, rencana pembagian Satuan Kawasan Permukiman (SKP) dan Satuan Permukiman (SP), rencana prasarana kawasan transmigrasi 2. Terbinanya para transmigran dengan kompetensi dan kualitas yang sesuai kawasan transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang dari total luas kawasan 20.809 Ha, maka pembangian ruang kawasan adalah sebagai berikut:

1. KPB, berlokasi di Desa Tadokkong dengan luasan 2.056 Ha, berfungsi sebagai pusat perkotaan dan pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi Marennu.
2. SKP A dengan luasan 8.025 Ha, pusat SKP di Desa Watang Kassa berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi Satuan Kawasan Permukiman (SKP) A dengan wilayah pelayanan sebanyak 6 (enam) satuan permukiman (SP).
3. SKP B dengan luasan 5.514 Ha, pusat SKP di Desa Sali-sali berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi Satuan Kawasan Permukiman (SKP) B dengan wilayah pelayanan sebanyak 4 (empat) satuan permukiman (SP).
4. SKP C dengan luasan 5.213 Ha, pusat SKP di Desa Basseang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi Satuan Kawasan Permukiman (SKP) C dengan wilayah pelayanan sebanyak 7 (tujuh) satuan permukiman (SP).

Penentuan komoditas unggulan dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sehingga di wilayah Kawasan Transmigrasi Marennu terdapat beberapa jenis komoditas unggulan yang diprioritaskan pengembangannya.

Dan Satuan Permukiman (SP), rencana prasarana sarana kawasan transmigrasi sektor pertanian, yaitu :

1. Kakao, Kopi dan Kemiri.
2. Produk pangan, yaitu: padi dan jagung.
3. Produk peternakan, yaitu: sapi, kambing dan ayam.

Sesuai dengan penyebaran pengusahaan komoditas unggulan tersebut serta potensi pengembangan komoditas pada masing-masing SKP, maka rencana pengembangan komoditas unggulan pada SKP di Kawasan Transmigrasi Marennu berupa:

1. Kebijakan penepatan standar pelayanan minimum sarana dan prasarana komoditas unggulan melalui penambahan input produksi.
2. SKP A dengan luasan s Tanaman, yakni upaya optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pengusahaan sepanjang tahun. Rencana ini diwujudkan pada lahan yang digunakan untuk pengusahaan tanaman semusim. Selain itu penerapan berbagai bentuk pola tanam seperti tumpang sari tanaman tahunan dengan tanaman semusim, integrasi ternak pada tanaman pangan dan berbagai variasi bentuk pengusahaan lainnya
3. Peningkatan pemeliharaan, yakni upaya peningkatan produksi pada tanaman tahunan dengan perbaikan teknik pemeliharaan tanaman dan pasca panen.
4. Pengusahaan (pengembangan) areal baru, yakni pengembangan komoditas unggulan pada SKP yang mempunyai lahan untuk pengembangan, hampir seluruh SKP di kawasan transmigrasi marennu mempunyai lahan yang dapat dikembangkan untuk pengusahaan berbagai komoditas unggulan.

Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi Marennu dilakukan pengembangan budidaya komoditas unggulan dengan memperhatikan keunggulan suatu komoditas. Kawasan Transmigrasi Marennu memiliki potensi untuk pengembangan pola usaha pokok berbasis unggulan sektor perkebunan. Pola usaha perkebunan dapat dikembangkan dalam kawasan sebagai agropolitan pertanian khususnya komoditas tanaman kakao, kopi dan jagung.

Pemanfaatan lahan untuk permukiman transmigrasi diatur pemerintah melalui kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan 7. Kebijakan pengendalian pembangunan Kawasan Transmigrasi Marennu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Keberhasilan dalam membangun kawasan transmigrasi didukung oleh beragam faktor, antara lain faktor ekonomi, sosial dan budaya. Satu peranan penting sebagai indikator fisik adalah prasarana perhubungan, dimana prasarana transportasi kawasan transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang berfungsi sebagai perhubungan antar wilayah SKP dan kawasan Ekonomi Regional di Kabupaten Pinrang. Sedangkan jaringan jalan desa dan jalan poros penghubung masih memegang peranan penting untuk menghubungkan desa-desa dengan pusat pertumbuhan yang berada dibawahnya.

Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar kawasan transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang belum didukung prasarana transportasi darat yang menghubungkan masing-masing pusat pertumbuhan baik antar SKP ataupun antar SP serta desa utama, sehingga arahan rencana prasarana jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah di Kawasan Marennu dan antar SKP serta SP dalam kawasan transmigrasi Marennu.

Hasil pertimbangan menyeluruh, maka Perencanaan Kawasan Transmigrasi Marennu Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan LAYAK DIPERTIMBANGKAN menjadi

KAWASAN

TRANSMIGRASI.

## GRAND DESAIN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PINRANG

Kerjasama Bappelitbangda kab. Pinrang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021

Perpustakaan modern yang dimaksud adalah perpustakaan dengan konsep layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat modern yang memerlukan beragam informasi dalam beragam format termasuk digital, namun juga tetap menyediakan layanan perpustakaan secara konvensional yaitu format tercetak, sehingga disebut juga sebagai perpustakaan hibrida, yaitu memadukan bahan pustaka dan layanan digital dengan bahan pustaka tercetak/terekam dengan layanan tradisional. Keragaman budaya di Kabupaten Pinrang menjadi ciri khas dan kekayaan utama Perpustakaan Kabupaten Pinrang yang akan dilayankan kepada masyarakat. Untuk semua itu akan dioptimalkan pemanfaatan teknologi mutakhir.

Perpustakaan Kabupaten Pinrang dalam memberikan layanannya tidak lepas. Ini berarti semua kekayaan khasanah literatur dan kebijakan daerah perlu dihimpun dan dikelola dengan baik sehingga dapat disajikan kepada masyarakat secara utuh, lengkap, akurat, cepat dan nyaman melalui berbagai format layanan baik secara konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Pinrang maupun masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, bahkan masyarakat dunia dapat mengetahui dengan mudah dan cepat serta lengkap dan akurat mengenai kekayaan budaya, sekaligus sebagai institusi yang menyediakan informasi dalam semua bidang bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Melalui institusi Perpustakaan Kabupaten Pinrang, pun masyarakat Kabupaten Pinrang dapat membagi informasi dan pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat luas, bukan saja bagi masyarakat Kabupaten Pinrang, masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan.

Untuk semua itu diperlukan rancangan yang matang pengembangan Perpustakaan Kabupaten Pinrang, yang dituangkan dalam dokumen Grand Desain Perpustakaan Kabupaten Pinrang. Rangkuman dokumen Grand Desain ini dapat dengan mudah dipahami melalui dua diagram berikut. Komponen dokumen menggambarkan dasar dan strategi pengembangan Perpustakaan Kabupaten Pinrang. Komponen pertama menggambarkan dasar dan arah serta keterkaitan antara pengembangan Perpustakaan Kabupaten Pinrang dengan lingkungan masyarakat serta pemerintah pusat provinsi dan daerah, sedangkan komponen lain menggambarkan strategi implementasi pengembangan Perpustakaan Kabupaten Pinrang.

## ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN PINRANG

Kerjasama Bappelitbangda kab. Pinrang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Puslitbang Sumberdaya Alam Universitas Hasanuddin Tahun 2021

17 subsektor ekonomi kreatif yang potensial di Kabupaten Pinrang yang meliputi Bidang aplikasi; Game developer; Arsitektur; Desain interior; Desain komunikasi visual; Desain produk; Fashion; Film, animasi, dan video; Fotografi; Kriya; Kuliner; Musik; Penerbitan; Periklanan; Seni pertunjukan; Seni rupa; Televisi dan radio. Selain itu, aktivitas penumbuhan industri kreatif jangan sampai terjebak pada deindustrialisasi prematur, berpuas pada penumbuhan UMKM yang gemuk namun miskin nilai tambah. Inti dari kegiatan ekraf adalah diseminasi ide yang diolah untuk menghasilkan produk dan jasa padat karya agar dapat menunjang pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah. Sejatinya, ekraf adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan. Upaya untuk memajukan ekraf di Kabupaten Pinrang sesungguhnya adalah dengan menciptakan ekosistem pengetahuan dengan terlebih dahulu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan empat elemen kreatif, antara lain (1) Merupakan inovasi seni kreatif yang berbasis pada daya cipta individu atau hak atas kekayaan intelektual; (2) Berasal dari budaya lokal atau berbasis pada sumber daya alam terbarukan di Kabupaten Pinrang; (3) Produk atau jasa yang dihasilkan berpotensi pasar, baik lokal maupun global; (4) Berdampak sosial dan mampu menjadi pemantik tumbuhnya klaster industri kreatif di tingkat lokal. Mengacu pada empat elemen kreatif tersebut, industri kreatif dapat dikenali dari aktivitasnya yang tidak hanya sekedar membuat produk atau jasa, tetapi juga mampu membuat temuan yang baru dengan memanfaatkan kemampuan teknologi sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah secara artistik dan emosional. Karena tidak semua pelaku usaha termasuk dalam ranah industri kreatif, bukan berarti pelaku usaha kecil yang baru tumbuh tidak dirasa perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif daerah. Justru pertumbuhan usaha-usaha mikro dan kecil dapat menjadi bagian dari sistem klaster industri kreatif melalui upaya prakarsa penguatan usaha kecil yang berbasis model bisnis inklusif.

Didefinisikan sebagai tempat baik fisik maupun virtual yang dapat menyatukan orang-orang kreatif. Fungsi mendasar dari sebuah creative hub adalah menjadi network collaborator, yaitu memprakarsai kolaborasi antara individu dan komunitas, tidak hanya dalam cakupan lokal daerah tetapi juga antar wilayah dan lintas sektor. Melihat fungsinya yang strategis, penting bagi creative hub ditopang oleh model bisnis yang kuat dan inklusif karena keberadaannya bertujuan menginkubasi kolaborasi potensial dan peluang-peluang start-up hingga menjadi fasilitator menemukan penyandang dana atau bahkan mendanai sendiri setiap kolaborasi yang tercipta.

Kelompok-kelompok UMKM yang tersebar juga perlu ditumbuh kembangkan melalui sebuah inkubator bisnis karena keberadaannya dapat menopang dan menjadi akselerator tumbuhnya industri kreatif. Fasilitas inkubator bisnis ini diharapkan dapat melakukan pendampingan wirausaha, khususnya usaha yang baru mulai karena bisnis pemula sangat rentan terhadap kegagalan sehingga perlu mendapatkan perhatian atau diberikan pelatihan agar dapat melewati fase kritis penumbuhan usaha. Sementara inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan, yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi. Melalui inkubator ini, pemerintah ingin

menumbuhkan wirausaha yang tangguh menghadapi persaingan ekonomi, khususnya wirausaha yang berbasis pada industri kreatif.

mengingat tuntutan sektor industri kreatif untuk bisa melek terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi. Fasilitas inkubator ini juga dapat membantu wirausaha baru untuk dapat mengakses lembaga pembiayaan hingga dapat melakukan business linkages dengan pasar potensial. Keberadaan inkubator bisnis di suatu daerah juga diperkuat melalui Permen Koperasi dan UKM No 24 Tahun 2015 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria inkubator wirausaha.

## PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN BERBASIS BUDIDAYA KAKAP PUTIH

Lembaga Pengembangan Sumberdaya Dan Teknologi Melalui Pendidikan  
Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Indonesia,  
Tahun 2021

Kakap putih (*Lates calcarifer*) memiliki nilai ekonomis penting sebagai ikan konsumsi sehingga banyak dibudidayakan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan kakap putih terutama pada penerapan teknologi dan sistem budidaya yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan mempercepat pertumbuhan ikan kakap putih, budidaya sistem terintegrasi, dan melakukan rekayasa bentuk wadah pemeliharaan. Ikan kakap putih termasuk jenis ikan yang mempunyai toleransi yang tinggi sehingga ikan kakap putih dapat dibudidayakan baik di kolam air tawar maupun tambak air payau dan juga dapat dibudidayakan di karamba jari ngapung di laut.

Ikan kakap putih dapat dikonsumsi dan memiliki nilai jual yang tinggi. Harga ikan kakap putih di tingkat pembudidaya berkisar Rp 75.000,- sampai dengan Rp 80.000,-/kg. Kakap putih merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ikan kakap putih mempunyai nilai jual yang tinggi yaitu Rp.60.000 - Rp.70.000/kg. Budidaya ikan kakap putih telah menjadi suatu usaha yang bersifat komersial (dalam budidaya) untuk dikembangkan, karena pertumbuhannya yang relatif cepat, mudah dipelihara dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan sehingga menjadikan ikan Kakap Putih cocok untuk usaha budidaya skala kecil maupun besar.

Ikan kakap putih merupakan jenis ikan karnivora dan bersifat kanibal yang merupakan sifat alami ikan tersebut. Umumnya sifat kanibal ditemukan pada umur atau ukuran benih, dan mulai berkurang setelah benih mencapai ukuran 7-10 cm. Dalam kondisi lapar dan tanpa adanya media pelindung (shelter) mengakibatkan terjadinya kanibalisme.

Budidaya kakap putih di tambak telah berjalan tanpa disengaja. Pembudidaya tambak di Kabupaten Pinrang sebagian besar mengelola tambaknya secara tradisional dengan sistem polikultur (campuran) antara udang windu (*Penaeus monodon*) dengan ikan bandeng (*Chanoschanos*). Setelah berbudidaya sekitar 3-4 bulan, selain udang windu dan bandeng yang dipanen juga terdapat beberapa jenis ikan lain sebagai hasil ikutan seperti kakap putih. Benih ikan kakap berasal dari alam (laut) dan masuk ke tambak bersamaan dengan air pasang dan dipanen bersama udang windu yang dibudidayakan. Inovasi di perlukan agar kakap putih dapat dibudidayakan dengan sistem polikultur tanpa mengurangi produksi udang windu.

Tanpa rekayasa manajemen budidaya yang baik, ikan kakap putih akan menjadi predator atau pemangsa berbagai jenis organisme budidaya di tambak termasuk udang windu.

Faktor utama yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan budidaya ikan adalah tersedianya benih yang kontinyu baik dalam jenis, jumlah maupun mutunya. Sampai saat ini sebagian besar pasok benih ikan yang sedang dibudidayakan masih berasal dari hasil tangkapan di alam. Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan benih dari alam, perlu adanya penguasaan teknologi pembenihan untuk ikan yang dibudidayakan sehingga dengan demikian dapat diproduksi benihnya secara massal untuk mendukung kelancaran usaha budidaya ikan itu sendiri.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan lendir ikan nila (*Tilapia mosambica*) berperan dalam mereduksi populasi bakteri *Vibrio harveyi* sehingga meningkatkan produksi budidaya. Hal yang sama diduga terjadi dengan lendir ikan kakap putih dan akan dikaji

sebagai salah satu inovasi dalam peningkatan produktivitas tambak, khususnya dalam mendukung produktivitas udang windu. *Vibrio harveyi* masih menjadi penyebab kematian pada budidaya udang windu, akan dikaji untuk direduksi dengan menggunakan pasokan air dari kegiatan budidaya kakap putih.

Budidaya polikultur kakap putih dan udang windu sangat menguntungkan pembudidaya karena keduanya merupakan komoditas ekspor dengan tingkat harga yang tinggi. Inovasi polikultur udang windu dan ikan kakap putih akan memberi penguatan terhadap minat pembudidaya untuk membudidayakan udang windu dan mendukung keberhasilan Kecamatan Lanrisang sebagai percontohan Kawasan Pengembangan Budidaya Udang Windu Ramah Lingkungan (PANDAWA-1.000) di Sulawesi Selatan.

Keberhasilan usaha budidaya polikultur kakap putih dan udang windu di tambak sangat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya penentuan lokasi, persiapan lahan, pemilihan benih, ukuran dan padat penebaran benih, pakan dan pemberian pakan, pengenalan dan pengendalian penyakit serta panen dan pasca panen. Jumlah pakan yang dihabiskan dalam kegiatan budidaya ikan kakap putih pada tahap pendederan masih cukup tinggi sekitar 50-60% yang disebabkan karena belum optimalnya pakan yang diserap oleh tubuh ikan.

Budidaya Polikultur Udang Windu dan Kakap Putih pada Kawasan Pengembangan Budidaya Udang Windu di Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang bertujuan sebagai berikut : (1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan berdasarkan kaidah kelestarian lingkungan; (2) Meningkatkan produktivitas tambak skala tradisional; dan (3) Mendesiminasikan inovasi teknologi budidaya tambak tradisional.

Kegiatan Dempond Budidaya Polikultur Kakap Putih dan Udang Windu di Tambak akan dimulai bulan Februari sampai Agustus 2021. Lokasi kegiatan di Pokdakan Cempae, Desa Waetue Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Budidaya polikultur kakap putih dan udang windu di tambak dengan metode petak percontohan (dempond) dimulai dari tahap penentuan lokasi, konstruksi tambak, persiapan lahan, penebaran benih, pemeliharaan, pemberian pakan dan panen.

Perlakuan penelitian terdiri dari : A (Polikultur Ikan Kakap Putih, Bandeng, dan Udang Windu dan B (Polikultur Ikan Kakap Putih dan Udang Windu). Pada perlakuan B digunakan waring untuk memisahkan ikan kakap putih dengan udang windu. Ikan kakap putih dan udang windu tidak berintersksi secara langsung Perlakuan B. Setiap perlakuan terdiri dari dua ulangan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) Pertumbuhan Mutlak, (2) Pertumbuhan Relatif, (3) Sintasan, (4) Produksi, (5) Keuntungan, dan (6) Kualitas Air.

Pertumbuhan mutlak rata-rata udang uji tertinggi dihasilkan Perlakuan A (210,9 kg) lebih tinggi dibandingkan dengan Perlakuan B (173,33 kg). Perlakuan A (195,89 kg) menghasilkan pertumbuhan mutlak rata-rata tertinggi untuk komoditas kakap dibandingkan dengan Perlakuan B (147,79 kg). Perlakuan A menghasilkan pertumbuhan mutlak rata-rata ikan bandeng sebesar 411,60 kg.

Perlakuan B menghasilkan pertumbuhan relatif rata-rata tertinggi dibandingkan dengan Perlakuan A. Pertumbuhan relatif menggambarkan proporsi pertambahan bobot dalam satuan persen. Pertumbuhan relatif menjadi indikator obyektif karena telah mengeliminasi pengaruh perbedaan luas areal dan bobo tawal. Pertumbuhan relatif rata-rata udang windu pada Perlakuan B (23.342,86 persen) lebih tinggi dari Perlakuan A (10.961,70 persen). Komoditas kakap menghasilkan pertumbuhan relatif rata-rata pada Perlakuan A (16.119,37 persen) lebih tinggi dari Perlakuan B (81.150 persen). Pertumbuhan ikan bandeng pada Perlakuan A mencapai 415,06 persen.

Tingkat sintasan berpengaruh terhadap hasil produksi selama masa pembesaran. Sintasan udang windu yang dicapai pada Perlakuan A (16,48 persen) dan Perlakuan B (20,58 persen) lebih rendah dari sintasan udang windu dengan aplikasi Phronima (61,54

$\pm 10,36$  persen) pada penelitian Fattah et al (2017). Sintasan udang windu hasil penelitian pada Perlakuan B (20,58 persen) masih tetap lebih tinggi hasil penelitian Fattah et al (2017) pada perlakuan tanpa aplikasi Phronima ( $17,20 \pm 7,34$  persen). Sintasan yang dihasilkan pada Perlakuan A dan B mengindikasikan pertumbuhan Phronima pada perlakuan penelitian tidak berkembang secara optimal. Konsentrasi rata-rata oksigen yang berada di bawah ambang batas terutama pada Perlakuan A menjadi salah satu penyebab rendahnya ketersediaan oksigen dan berdampak pada rendahnya sintasan udang windu. Konsentrasi oksigen yang rendah dan polikultur tiga komoditas akan mempercepat penurunan populasi Phronimase hingga membatasi ketersediaan pakan alami pada Perlakuan A. Keterbatasan nutrisi berdampak terhadap rendahnya sintasan pada Perlakuan A.

Nilai sintasan bandeng tertinggi didapatkan pada perlakuan A kepadatan  $10 \text{ ekor/m}^2$  sebesar  $84,66 \pm 3,28$  persen diikuti oleh perlakuan B kepadatan  $20 \text{ ekor/m}^2$  sebesar  $81,79 \pm 4,26$  persen dan perlakuan C kepadatan  $30 \text{ ekor/m}^2$  sebesar  $74,96 \pm 4,79$  persen. Kepadatan  $30 \text{ ekor/m}^2$  yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai kelulus hidupan yang terendah yaitu  $72,22 \pm 6,80$  persen. Kepadatan  $30 \text{ ekor/m}^2$  yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai kelulus hidupan yang terendah yaitu  $74,96 \pm 4,79$  persen. Hal ini diduga pada padat penebaran  $30 \text{ ekor/m}^2$  ruang gerak ikan semakin sempit dan terjadi persaingan pakan yang akan menyebabkan ikan menjadi stress.

Sintasan yang dihasilkan pada Budidaya Polikultur ikan kakap putih terutama dengan komoditas udang windu turut dipengaruhi oleh keterpenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP). Udang windu ditebar mendahului penebaran ikan kakap. Ikan kakap putih ditebar setelah sebulan penebaran udang windu. Penebaran udang windu tidak lagi dilakukan lagi setelah penebaran ikan kakap. Jarak waktu penebaran udang windu dengan penebaran ikan kakap putih dapat diperpendek dengan penebaran udang windu ukuran tokolan. Pentokolan udang windu stadia Pasca Larva (PL-12) dianjurkan dilakukan selama 30 hari. Kebiasaan pembudidaya udang windu di Kabupaten Pinrang melakukan penebaran ganda (maddobolo) dapat diadaptasi dengan melakukan penebaran udang windu sebanyak tiga tahap dan satu tahap penebaran ikan kakap putih. Penebaran ikan kakap putih dilakukan setelah sebulan penebaran udang windu tahap ketiga. Rentang waktu antara penebaran udang windu dengan ikan kakap dapat diperpendek dengan penebaran udang windu yang telah ditokolan.

Produksi udang windu tertinggi per ha dihasilkan pada Perlakuan B ( $175,89 \text{ kg/ha}$ ) dibandingkan dengan Perlakuan A ( $161,36 \text{ kg per ha}$ ). Produksi tertinggi komoditas kakap dihasilkan pada Perlakuan B ( $275,01 \text{ kg per ha}$ ) dan Perlakuan A ( $149,36 \text{ kg per ha}$ ). Produksi bandeng Perlakuan A sebanyak  $129,18 \text{ kg per ha}$ .

Produksi udang windu pada Perlakuan A ( $161,36 \text{ kg per ha}$ ) dan  $175,89 \text{ kg per ha}$  pada Perlakuan B lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Fattah et al (2017) yang mencapai  $285,44 \pm 88,02 \text{ kg per ha}$  dengan aplikasi Phronima suppa tetapi lebih tinggi dari  $50,63 \pm 24,27 \text{ kg}$  pada petakan tanpa aplikasi Phronima. Produksikan bandeng pada penelitian Fattah et al (2017) mencapai  $337,50 \pm 180,77 \text{ kg}$  lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian pada Perlakuan A ( $129,18 \text{ kg per ha}$ ). Ketersediaan Phronima pada seluruh perlakuan penelitian telah berkontribusi pada peningkatan produksi komoditas budidaya. Pengaturan padat penebaran komoditas budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan ketersediaan Phronima menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan padat tebar seluruh komoditas budidaya. Keterbatasan sediaan Phronima dan kualitas air terutama kelarutan oksigen yang berada dibawah kisaran yang direkomendasikan berdampak terhadap rendahnya produksi udang windu.

Modal Perlakuan B (Rp 3.902.917 per ha) lebih tinggi dari Perlakuan A (Rp 3.804.537 per ha). Perlakuan B menghasilkan keuntungan sebesar Rp 13.610.184 per ha lebih tinggi dari Perlakuan A (Rp 12.368.782 per ha). Keuntungan yang dihasilkan dari

Perlakuan A (Rp 12368.782 per ha) dan B (Rp 13.610.184 per ha) masih lebih rendah dari Fattah et al (2017) yang mencapai Rp 22.6000.000 per ha. Budidaya ikan kakap memiliki harga yang kompetitif sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat. Tata kelola budidaya yang baik terutama ditekankan pada aspek pengaturan padat penebaran komoditas polikultur, pengendalian ketersediaan Phronima, dan pengaturan kualitas air.

Faktor kritis ditimbulkan oleh salinitas pada Perlakuan A dan oksigen terlarut untuk Perlakuan A dan B. Salinitas yang berada pada kisaran 7 -23 ppt (Perlakuan A) dan Perlakuan B (8 – 23 ppt) tidak memenuhi persyaratan kehidupan udang windu (10 – 25 ppt), kakap (15 – 35 ppt), dan bandeng (15 – 35 ppt). Kualitas air menjadi faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup ikan. Berdasarkan data pengukuran kualitas air dapat diketahui bahwa hasil pengukuran kualitas air tergolong baik. Nilai pengukuran pH juga tergolong baik yakni 7,0 – 8,0 masih berada pada batas normal budidaya udang windu, kakap putih, dan bandeng. Nilai pH rendah dapat menyebabkan terjadinya penggumpalan lendir pada insang dan ikan akan mati lemas sehingga energi Suhu berada pada kisaran 26 – 31°C. Amoniak berada pada kisaran 0,01 – 0,05 ppm.

Suhu yang didapat selama pemeliharaan berkisar antara 26,6 hingga 31,3<sup>o</sup> konsentrasi oksigen berada di luar kisaran normal untuk seluruh perlakuan. Rendahnya kadar oksigen pada Perlakuan B disebabkan terjadinya blooming alga (Gambar 4). Menurut Zonneveld (1991), kisaran oksigen terlarut untuk budidaya ikan berkisar 3-5 ppt. Nilai oksigen terlarut setiap perlakuan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ikan seperti bertambah panjang, bobot ikan dan sifat ikan bandeng yang bergerombol dapat mempengaruhi ruang gerak udang windu dan ikan menjadi sempit sehingga ikan akan bersaing untuk mendapatkan oksigen. Ketiadaan komoditas ikan bandeng pada Perlakuan B menyebabkan tidak adanya pengendali kelimpahan lumut. Blooming lumut menyebabkan penurunan kadar oksigen terutama pada dini hari.

## RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 - 2026

Kerjasama Bappelitbangda kab. Pinrang dan Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat Puslitbang Sumberdaya Alam  
Universitas Hasanuddin Tahun 2021

### PENDAHULUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pinrang dimaksudkan sebagai bagian dari tahapan sistematis proses penanggulangan kemiskinan yang kemudian menjadi kerangka acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dalam daerah oleh seluruh stakeholder pembangunan, meliputi pemerintah, swasta, masyarakat dan berbagai pihak untuk menjamin upaya-upaya terkoordinasi dan terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuan RPKD adalah : 1) Menegaskan komitmen pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan dalam daerah khususnya dan nasional pada umumnya; 2) Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (right based approach) dalam perumusan strategi dan kebijakan; 3) Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); dan 4) Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan.

### DETERMINAN KEMISKINAN

Dalam satu dekade terakhir, pada dasarnya terdapat kecenderungan kenaikan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang, walaupun nampak dinamis, namun trend secara linier menunjukkan kenaikan angka kemiskinan rata-rata sebesar 360-an orang per tahun atau sekitar 0,0275% setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan kondisi provinsi dan nasional pada umumnya, maka terlihat kecenderungan negatif, koefisien regresi pada tingkat provinsi menunjukkan trend penurunan 0,2184% per tahun dan nasional sebesar 0,3472% per tahun. Dengan kata lain, angka kemiskinan selama sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Pinrang berkembang secara dinamis naik dan turun.

### ANALISIS PAD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Total realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.221 M dan pada Tahun 2018 mencapai angka Rp. 1.312 M atau meningkat 7,5% dengan rata-rata pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir sebesar 2,5% per tahun. Implikasi keberhasilan pada sisi perpajakan sebagaimana hasil identifikasi menurut Tax Ratio, belum tentu sama pada sudut pandang kemiskinan apabila memperhatikan komposit PAD Kabupaten Pinrang dalam dua tahun terakhir dimana komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlihat mengalami kenaikan dalam struktur PAD.

Terkait dengan isu mengurangi beban pengeluaran penduduk, khususnya penduduk miskin, maka perlu diidentifikasi apakah pajak dan retribusi daerah tersebut berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat miskin. Guna mengetahui hal tersebut, maka salah satu indikator yang dapat digunakan adalah dengan formulasi Rasio Pajak Per Kapita (Tax Per Capita-TPC) yaitu rasio yang membandingkan total pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam daerah.

## TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENAGGULANGAN KEMISKINAN

Berdasarkan tujuan akhir pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pinrang, sebagaimana yang terkandung dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, maka arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam daerah adalah : 1) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; 2) Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; 3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin; dan 4) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang terumuskan adalah : 1) Strategi peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 2) Strategi pengurangan beban masyarakat; 3) Strategi pengembangan dan jaminan keberlanjutan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah (IMKM); dan 4) Strategi sinergitas program penanggulangan kemiskinan lintas stakeholder.

## ISU STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH

Setelah melalui runutan prosedur dalam penyusunan dokumen SPKD ini, paling tidak terdapat tiga komponen yang menyusun suatu isu strategis, yaitu : 1) Substansi atau bagian utama yang menjelaskan masalah yang akan ditangani (hasil analisis kondisi kemiskinan); 2) Proses, bagian dari pernyataan isu strategis yang menjelaskan cara atau upaya untuk menangani masalah (hasil analisis determinan kemiskinan dan prioritas intervensi); 3) Konteks, merupakan bagian dari pernyataan isu strategis yang menggambarkan lingkungan penanganan masalah (hasil dari analisis kondisi umum daerah, kinerja anggaran, kinerja kebijakan serta kinerja kelembagaan yang ada).

## KESIMPULAN

Permasalahan-permasalahan yang fokus untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang adalah :

1. Integrasi program penanggulangan kemiskinan antar OPD;
2. Masih lemahnya koordinasi OPD dengan TKPK Kab. Pinrang;
3. Sinkronisasi antara SPKD dan RPJMD;
4. Program kerja kemiskinan cenderung monoton, kurang improvisasi dan terkesan peran otonomi masih sangat kurang;
5. Sebagian besar program dan kegiatan bersifat bantuan langsung, sehingga kurang mendorong kemandirian masyarakat miskin;
6. Capaian dan dasar penanggulangan kemiskinan selalu menggunakan indikator capaian makro, sehingga belum optimal menggambarkan capaian secara lebih mendalam;
7. Dukungan pendanaan operasional TKPK Daerah yang belum maksimal;
8. Optimalisasi pemanfaatan Basis Data Terpadu hasil PPLS yang masih kurang terutama pada OPD;
9. Masih sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses modal perbankan;

## REKOMENDASI

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang masih memerlukan perencanaan program yang lebih sistematis dan perlu dilaksanakan secara terpadu. Melihat kondisi secara riil dalam lima tahun terakhir, sebagai upaya perbaikan tahunM tahun berikutnya maka direkomendasikan beberapa poin sebagai berikut :

1. Mempertajam rencana pembangunan daerah terkait penanggulangan kemiskinan melalui pengintegrasian program;
2. Perumusan dan penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan pada tiap SKPD;
3. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di semua sektor terkait;

4. Harmonisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, terutama lingkup pemerintahan dalam Kabupaten Pinrang;
5. Pengembangan database penduduk (pangkalan data) miskin yang dapat diakses oleh SKPD/Unit Kerja;
6. Mengimplementasikan konsep One House One Solution, sebagai bentuk penyelesaian masalah kemiskinan secara pendekatan persuasif dengan indikator mikro;
7. Mempercepat pencapaian SDGs melalui beberapa program/kegiatan.

## FEASIBILITY STUDY PENENTUAN JENIS PERKERASAN JALAN KECAMATAN DUAMPANUA DAN KECAMATAN PATAMPANUA

Pusat Unggulan Center of Technology (COT) Fakultas teknik Universitas  
Hasanuddin, Tahun 2021

### LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau yang mencapai belasan ribu. Hal ini tersebar diseluruh bagian wilayah Indonesia dengan sedikitnya terdapat 5 pulau besar dan selebihnya dikelilingi pulau-pulau kecil lainnya, konektivitas adalah suatu penunjang dalam berlangsungnya kehidupan bagi suatu wilayah atau negara. Hal ini dikarenakan banyak proses-proses ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Sebagai salah satu upaya memenuhi Visi Misi Bupati Pinrang Periode 2019-2024 terkait pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah Kab.Pinrang bagian Utara.

### TUJUAN

1. Melakukan analisis terkait perkerasan jalan;
2. Melakukan analisis ekonomi;
3. Mendapatkan tinjauan lingkungan terkait rencana pembangunan jalan.

### REKOMENDASI

1. Ruas Malimpung-Kampung Baru, direkomendasikan untuk masuk kedalam ruas Provinsi karena menghubungkan Kab. Pinrang dan Kab. Sidrap.
2. Ruas Salipolo-Babana, direkomendasikan untuk masuk kedalam ruas kelurahan karena hanya menghubungkan antar kelurahan saja serta akses jalan yang kurang layak dilalui kendaraan.
3. Ruas Barugae-Bungi, direkomendasikan untuk dikeluarkan dari jalan Kabupaten karena jalan tidak pernah dilalui dan tidak layak untuk diakses kendaraan.
4. Ruas Kaballangang-Batulappa, direkomendasikan untuk dikeluarkan dari jalan Kabupaten karena jalan tidak pernah dilalui dan tidak layak untuk diakses kendaraan.
5. Ruas Talabangi Toa-Ongkoe, direkomendasikan untuk dikeluarkan dari Jalan Kabupaten karena jalan sangat jarang dilalui dan tidak layak untuk diakses kendaraan.

## STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PINRANG

Kerjasama Bappelitbangda kab. Pinrang dan Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat Puslitbang Sumberdaya Alam  
Universitas Hasanuddin Tahun 2021

### LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Untuk itu pembangunan Kawasan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, dan terencana. Maka penyelenggaraan Kawasan permukiman merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya dalam ruang lingkup penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah Kabupaten/Kota.

### TUJUAN

Untuk mengakomodir permasalahan dan isu strategis pembagunan dalam daerah terkait dengan Kawasan permukiman kedalam suatu strategi pembangunan/ pengembangan secara terintegrasi dan berkesinambungan guna menetapkan prioritas penyelenggaraan infrastruktur daerah.

### KESIMPULAN

Strategi penyelenggaraan Kawasan permukiman disusun sebagai kebutuhan akan perencanaan infrastruktur permukiman yang terpadu, baik secara spasial (input pemetaan) maupun input literal (input tabular). Guna mendukung operasionalisasi di lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi lebih efektif dan efisien, maka penyusunan strategi penyelenggaraan Kawasan permukiman dilakukan berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG).

## REVIEW PENYUSUNAN DOKUMEN RISPAM KAB. PINRANG

Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat  
(YLP2EM) Kota Pare-pare Tahun 2021

### LATAR BELAKANG

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas serta kontinuitas yang memadai. Pada hakekatnya, alam lingkungan telah menyediakan air minum yang dibutuhkan manusia, Namun demikian desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan ekosistem lingkungan. Pengembangan sistem penyediaan air minum banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib Pemerintah Daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### TUJUAN/SASARAN

Sasaran dari kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Pinrang.
2. Identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Pinrang (unit air baku, produksi, distribusi, cakupan pelayanan, pelayanan).
3. Tersusunnya strategi dan program Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Pinrang (pola investasi dan pembiayaan, tahapan pembangunan SPAM).

### REKOMENDASI

Untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang komprehensif di bidang pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum di Kabupaten Pinrang, maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain :

- a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2021-2040 Kabupaten Pinrang ini, harus dituangkan dalam suatu regulasi, sehingga menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait di dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Pinrang di bidang pelayanan dasar pemenuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.
- b. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2021-2040 Kabupaten Pinrang ini, diharapkan ditindaklanjuti secara bersama oleh OPD yang terkait serta stakeholders lainnya. Untuk itu diperlukan suatu Rencana Aksi Bersama (RAB) yang terkait pembangunan di bidang pelayanan dasar pemenuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pinrang, dengan tetap menjacu pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2021-2040 Kabupaten Pinrang.
- c. Pelaksanaan, capaian dan masalah Rencana Aksi Bersama (RAB) yang terkait pembangunan di bidang pelayanan dasar pemenuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pinrang, dengan tetap menjacu pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2021-2040 Kabupaten Pinrang, harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.



